



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EFEKTIFITAS RETRIBUSI
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN**

SKRIPSI

TRI KURNIAWAN PUJIANTO

0706165154

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

DEPOK

2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EFEKTIFITAS RETRIBUSI
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi

TRI KURNIAWAN PUJIANTO

0706165154

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPOK

2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Tri Kurniawan Pujiyanto

NPM : 0706165154

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 November 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Tri Kurniawan Pujianto

NPM : 0706165154

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

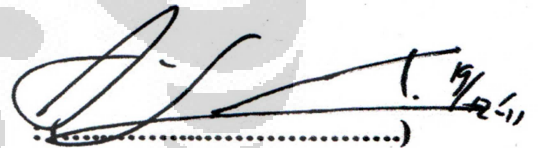
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Retribusi Taman Margasatwa Ragunan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterimasebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelarSarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing :

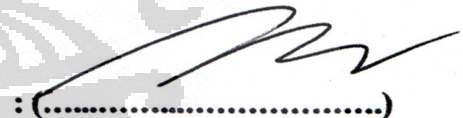
Drs. Achmad Lutfi, M.Si



(.....)

Penguji :

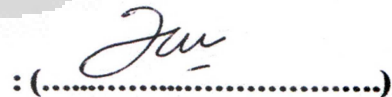
Dra. Inayati Hifni, M.si



(.....)

Ketua Sidang :

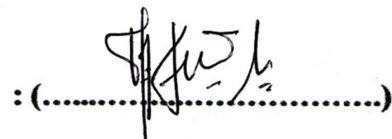
Umanto Eko, S.Sos., M.Si



(.....)

Sekretaris :

Desy Hariyati, S.Sos



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 November 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas perlindungan, petunjuk dan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama empat tahun lamanya menjalani kuliah di jurusan ilmu administrasi negara, akhirnya menemukan titik terakhir dari sebuah perjalanan masa kuliah, yaitu penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi. Pemilihan topik skripsi yang berjudul “Analisis Efektifitas Retribusi Taman Margasatwa Ragunan” tidak terlepas dari sebuah pemikiran penulis yang ingin membahas mengenai hal yang bisa mengembangkan sebuah daerah, dimana salah satunya adalah mengenai retribusi, oleh karena itu penulis ingin paling tidak memberikan kontribusi dalam bentuk sebuah karya tulis ini.

Sebuah perjalanan yang panjang dan tak terhitung banyaknya pihak yang membantu penulis dan memberi pengaruh serta membentuk karakter penulis baik dari segi formal maupun informal. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

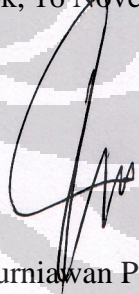
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UI, dan juga sebagai pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh tim penguji sidang skripsi yaitu: Dra. Inayati M.Si sebagai penguji yang telah memberikan banyak masukan, Umanto S.Sos., M.Si. sebagai ketua sidang yang telah memimpin jalannya sidang, dan

Desy Hariyati S.Sos. sebagai sekretaris yang memberi masukan mengenai hal teknis, semua hal kritikan dan masukan tersebut sangat membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik dari skripsi ini.

5. Kedua orang tua, ibu dan bapak yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan kepada penulis yang tidak terhingga dan tidak mungkin bisa dibalas oleh penulis, dan juga kedua kakak penulis yang selalu bisa memberikan masukan dari pengalaman yang telah mereka alami untuk disampaikan kepada penulis;
6. Rifika Sari Midorini, yang selama ini telah memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menjalani masa kuliah dan juga pada mengerjakan skripsi, sebuah hal yang sangat tidak ternilai bagi penulis;
7. Para narasumber, dari pihak BLUD Taman Margasatwa Ragunan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, PKBSI, LPHKI, dan juga pengunjung Taman Margasatwa Ragunan;
8. Kepada teman-teman tercinta mahasiswa ilmu administrasi negara yang selama ini telah banyak membantu dan bersama dalam mengisi hari-hari dalam empat tahun terakhir sebagai mahasiswa, sebuah kenangan yang tak terlupakan.
9. Tidak lupa kepada teman-teman dari jurusan administrasi niaga dan fiskal yang telah mewarnai kehidupan kampus selama empat tahun terakhir.
10. Seluruh staf pengajar dan pegawai FISIP-UI, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun memiliki kontribusi bagi penulis selama kuliah selama empat tahun dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semua jerih payah yang sangat berarti ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah selama ini mendukung penulis dalam menjalani hidup ini. Pencapaian terbesar dalam hidup penulis ini tidak akan bermakna dan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan mereka. Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ditemukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan kegiatan pemerintahan daerah khususnya yang berkaitan dengan retribusi.

Depok, 16 November 2011



Tri Kurniawan Pujianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Kurniawan Pujiyanto
NPM : 0706165154
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

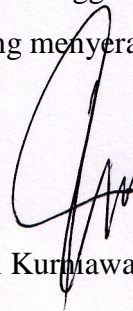
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Efektifitas Retribusi Taman Margasatwa Ragunan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 16 November 2011

Yang menyerahkan,



(Tri Kurniawan Pujiyanto)

ABSTRAK

Nama : Tri Kurniawan Pujiyanto
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Efektifitas Retribusi Taman Margasatwa Ragunan

Penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas dari sebuah pelaksanaan retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah pelaksanaan kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan berjalan efektif. Tingkat efektifitas retribusi dapat dilihat melalui tolak ukur dari kinerja retribusi yang dikemukakan oleh Nick Devas, yaitu upaya retribusi, hasil guna, dan daya guna, kemudian untuk melihat lebih mendalam penulis juga menggunakan teori penetapan tarif. Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dan juga analisis data retribusi Taman Margasatwa Ragunan. Adapun hasil yang diperoleh adalah kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan belum dapat memenuhi semua kategori sebuah retribusi yang efektif, permasalahan utama yang ditemukan oleh penulis yaitu kesalahan penetapan tarif yang rendah.

Kata kunci: Retribusi, efektifitas, Taman Margasatwa Ragunan

ABSTRACT

Name : Tri Kurniawan Pujianto
Study Program : Public Administration
Title : Analysis of the Effectiveness charge of Wildlife Parks Ragunan

This study describes the effectiveness of an execution Charge Ragunan Wildlife Park conducted by the Jakarta administration. The purpose of this study was to analyze the implementation activities Ragunan Wildlife Parks charge effectiveness. Level of effectiveness of charge can be seen through the benchmarks of the performance charge raised by Nick Devas, the charge efforts, the effectiveness, and efficiency, and then to look more deeply the author also uses the theory of tariff determination. The study was conducted through in-depth interviews to the parties concerned and also the data analysis Ragunan Wildlife Parks charge. The results obtained are activities Ragunan Wildlife Parks charge has not been able to meet all categories of an effective charge, the main problem found by the authors that a low error rate determination.

Key words: Charge, Effectiveness, Ragunan Wildlife Parks

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Signifikansi Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.2 Kerangka Teori	15
2.2.1 Evaluasi Kebijakan	15
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.2.3 Retribusi.....	23
2.2.4 Retribusi Daerah	27
2.2.5 <i>Specific Benefit Charge</i>	31
2.2.6 Efektifitas Retribusi	32

2.2.7	Penetapan Tarif Retribusi	35
BAB 3 METODE PENELITIAN		
3.1	Pendekatan Penelitian	42
3.2	Jenis Penelitian.....	43
3.3	Subjek Penelitian	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5	Teknik Analisis Data.....	46
3.6	Operasionalisasi Konsep.....	46
BAB 4 GAMBARAN UMUM		
4.1	Sejarah Taman Margasatwa Ragunan.....	48
4.2	Fungsi Taman Margasatwa Ragunan.....	50
4.3	Letak Geografis Taman Margasatwa Ragunan.....	52
4.4	Organisasi Taman Margasatwa Ragunan.....	53
4.5	Tarif Retribusi Taman Margasatwa Ragunan	56
BAB 5 ANALISIS		
5.1	Upaya Retribusi (<i>charge effort</i>).....	59
5.2	Efektifitas (<i>effectiveness</i>).....	68
5.3	Efisiensi (<i>efficiency</i>).....	79
5.4	Penetapan Tarif (<i>pricing</i>).....	88
BAB 6 PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	99
6.2	Saran... ..	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan 2008-2010.....	4
Gambar 4.1	Pusat Primata Schmutzer	49
Gambar 4.2	Fauna di Taman Margasatwa Ragunan.....	50
Gambar 4.3	Flora di Taman Margasatwa Ragunan	51
Gambar 4.4	Peta Lokasi Taman Margasatwa Ragunan.....	52
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	56
Gambar 5.1	Grafik Pendapatan dan Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan tahun 2008-2010.....	65
Gambar 5.2	Bukti Pembayaran tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan	69
Gambar 5.3	Kepadatan di loket Taman Margasatwa Ragunan	71
Gambar 5.4	Kondisi Infrastruktur yang Rusak di Taman Margasatwa Ragunan.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian.....	13
Tabel 2.2	Tiga Pendekatan Evaluasi.....	16
Tabel 2.3	Perbedaan Barang Publik, Semi Publik, dan Pribadi.....	28
Tabel 3.1	Operasionalisasi Konsep.....	47
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2008-2010.....	75
Tabel 5.2	Realisasi pendapatan Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010.....	77
Tabel 5.3	Realisasi Belanja/Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan tahun 2008-2010.....	80
Tabel 5.4	Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2008.....	82
Tabel 5.5	Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2009.....	83
Tabel 5.6	Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010.....	84
Tabel 5.7	Anggaran Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010 (Subsidi).....	85
Tabel 5.8	Anggaran Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010 (Non-Subsidi).....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara dengan pihak BLUD TMR.....	105
Lampiran 2	Pedoman Wawancara dengan pihak BPKD DKI Jakarta	106
Lampiran 3	Pedoman Wawancara dengan pihak Direktorat PDRD	107
Lampiran 4	Pedoman Wawancara dengan pihak LPHKI.....	108
Lampiran 5	Pedoman Wawancara dengan pihak PKBSI.....	108
Lampiran 6	Pedoman Wawancara dengan Masyarakat/pengunjung.....	109
Lampiran 7	Transkrip Wawancara BLUD TMR.....	110
Lampiran 8	Transkrip Wawancara BPKD DKI Jakarta	121
Lampiran 9	Transkrip Wawancara Direktorat PDRD	129
Lampiran 10	Transkrip Wawancara PKBSI.....	135
Lampiran 11	Transkrip Wawancara LPHKI	140
Lampiran 12	Transkrip Wawancara Masyarakat/pengunjung	145

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri yang tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong kreatifitas dan inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal sangat diperlukan sehingga daerah mempunyai kemandirian dalam mengelola, menggali dan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahannya. Idealnya, sumber-sumber keuangan tersebut diperoleh dari daerah sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen penting dalam PAD adalah pajak dan retribusi. Pajak dipungut dari masyarakat tanpa memperhatikan besar kecilnya pelayanan/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi dibayar oleh masyarakat sebagai imbal balik atas pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya memperkuat desentralisasi fiskal, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun

2009 yang disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 lalu, yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam kegiatan meningkatkan potensi daerahnya tersebut, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pungutan yang berupa retribusi yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (terdapat pada UU no.28 tahun 2009 BAB VI tentang retribusi bagian kedua pasal 110). Sementara dalam kaitannya dengan penyediaan jasa/pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah diperkenankan memungut retribusi yang meliputi 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009, dimana ada penambahan jenis retribusi sebanyak 3 (tiga) jenis retribusi dari yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) jenis retribusi jasa umum pada UU No.34 Tahun 2000. Sedangkan pada retribusi jasa usaha tidak ada penambahan jenis retribusi dari UU No.34 Tahun 2000 ke UU No.28 Tahun 2009 yaitu sejumlah 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha. Dalam retribusi Perizinan Tertentu terdapat penambahan satu jenis retribusi, dimana yang sebelumnya pada UU No.34 Tahun 2000 ada 4 (empat) jenis retribusi perizinan tertentu, sekarang pada UU No.28 Tahun 2009 ada 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu.

Diantaranya yang menjadi bagian dari jenis retribusi daerah adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). Sebagai bagian dari jenis retribusi jasa usaha dimana prinsip-prinsip komersial berlaku, retribusi Tempat Rekreasi dan juga PKD berpotensi memberikan kontribusi bagi PAD mengingat pemerintah daerah dalam menetapkan tarif atas layanan yang diberikan dapat memperhitungkan besarnya margin keuntungan.

Potensi lainnya adalah, secara umum daerah mempunyai harta yang dikuasai atau dimiliki daerah namun belum dimanfaatkan secara penuh oleh daerah dan sektor swasta belum dapat menyediakan pelayanan sejenis dengan memadai.

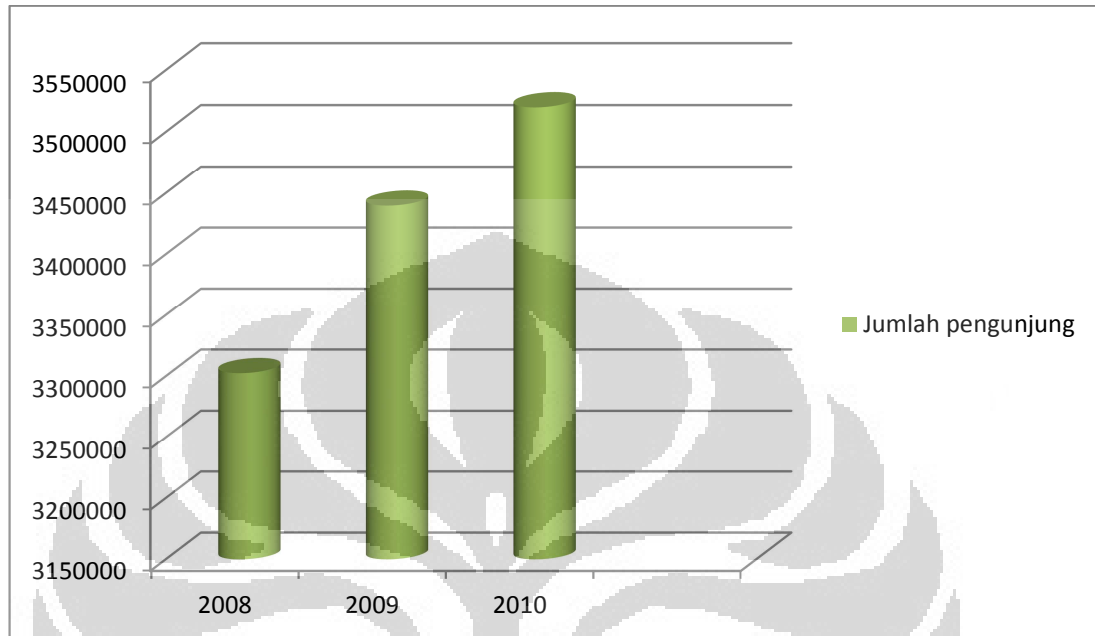
Kota-kota besar merupakan salah satu yang paling diuntungkan dengan adanya jenis retribusi ini, dimana dengan adanya retribusi pemakaian daerah dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi tersebut sangatlah besar jika kita melihat Kota Jakarta sebagai provinsi ibukota Negara Indonesia, dimana arus keuangan yang besar terjadi didalamnya, maka tidak dapat dipungkiri jika Kota Jakarta juga memiliki potensi dalam hal retribusi. Penyediaan taman margasatwa yang menjadi salah satu bentuk dari retribusi tempat rekreasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Dalam kondisi sekarang ini pariwisata dan hiburan bagi masyarakat belum bisa sepenuhnya disediakan oleh pihak swasta di kota Jakarta, namun pemerintah DKI Jakarta memiliki keuntungan tersebut dengan mempunyai Taman Margasatwa Ragunan di daerah Jakarta Selatan, hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah DKI Jakarta yang dapat menarik retribusi di Taman Margasatwa Ragunan, mengenai retribusi tersebut diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi daerah bagian 6 (enam). Dalam peraturan tersebut telah tercantum mengenai ketentuan, objek, golongan, nama, subjek, dan bahkan tarif yang diberlakukan untuk memungut retribusi Taman Margasatwa Ragunan.

Kebutuhan masyarakat akan tempat wisata dan hiburan membuat Taman Margasatwa Ragunan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi warga Jakarta, dimana taman rekreasi tersebut masih diminati, walaupun sudah banyak tempat hiburan di Jakarta seperti Mal-mal, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan tidak kalah bersaing dan cenderung mengalami peningkatan pengunjung setiap tahunnya, dimana dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan 2008-2010



Sumber: BLUD Taman Margasatwa Ragunan

Mulai dari 3.302.549 pengunjung pada tahun 2008, meningkat menjadi 3.439.760 juta pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 3.523.510 juta pengunjung, dan di proyeksikan pada tahun 2011 akan melebihi 3,6 juta pengunjung (data BLUD Taman Margasatwa Ragunan). Dapat dilihat peningkatan jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan sebesar 100.000 pengunjung tiap tahunnya. Daya tarik dari Taman Margasatwa Ragunan tidak lepas dari keunikannya sebagai tempat hiburan warga masyarakat Jakarta, sebuah taman seluas 147 hektar dan berpenghuni lebih dari 3.000 ekor satwa serta ditumbuhi lebih dari 50.000 pohon membuat suasana lingkungannya sejuk dan nyaman (<http://www.jakartazoo.org>), hal itulah yang membuat Taman Margasatwa terus dikunjungi oleh warga Jakarta dan bahkan warga dari luar kota Jakarta, terutama ketika pada musim liburan.

Hal-hal tersebut merupakan sebuah potensi tersendiri bagi pemerintah kota Jakarta untuk meraih keuntungan melalui retribusi Taman Margasatwa Ragunan. Namun fakta yang terjadi adalah bahwa Taman Margasatwa Ragunan masih membutuhkan alokasi keuangan dari pemerintah daerah Jakarta, dimana dari tahun 2005-2010 besaran subsidi tersebut sebesar 35 miliar tiap tahunnya yang

diambil dari APBD Jakarta (www.detik.com). Terkait dengan subsidi tersebut yang perlu diperhatikan adalah mengenai tarif yang menjadi dasar retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana pemerintah DKI Jakarta menetapkan tariff untuk tiket masuk sebesar Rp 4.000 untuk orang dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak. Harga tersebut masih lebih rendah dari harga tiket masuk tempat wisata lainnya di Jakarta, seperti Taman Impian Jaya Ancol sebesar Rp 15.000 dan juga Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp 10.000. bahkan jika dibandingkan dengan kebun binatang di daerah lain seperti di kebun binatang Bandung yang menetapkan tarif sebesar Rp 15.000, kebun binatang Surabaya sebesar Rp 10.000, dan kebun binatang mangkang Semarang sebesar Rp. 5000, harga tiket Taman Margasatwa Ragunan masih lebih rendah.

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan adanya retribusi Taman Margasatwa Ragunan juga diharapkan untuk memberikan kontribusi PAD pemerintah DKI Jakarta, namun tidak dapat dipungkiri apabila masih terdapat permasalahan yang membuat kurang optimalnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, seperti terkait masalah subsidi dan juga tarif. Bagaimana pelaksanaan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, apakah sudah berjalan efektif dalam setiap kegiatan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta? Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul “*Analisis Efektifitas Retribusi Taman Margasatwa Ragunan*”

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun rumusan masalah penelitian ini dijabarkan dalam dua pertanyaan penelitian dibawah ini :

- Bagaimana efektifitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam retribusi Taman Margasatwa Ragunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan efektifitas dari kebijakan dalam pengenaan tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan sebagai berikut :

1. Menganalisis efektifitas dari pelaksanaan pemungutan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam retribusi Taman Margasatwa Ragunan
2. Menganalisis tingkat efektifitas dari kebijakan pengenaan tarif yang diterapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait dengan retribusi Taman Margasatwa Ragunan

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan (*Policy Makers*) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan retribusi pemakaian daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana dari sisi pembuat kebijakan dapat menjadikan acuan dalam pembuatan kebijakan mengenai retribusi daerah sehingga dapat berjalan efektif untuk ke depannya. Dan juga masyarakat sebagai yang menggunakan jasa dari adanya Taman Margasatwa Ragunan dan dipungut retribusi, maupun masyarakat yang akan menikmati hasil dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian ini dan dalam rangka memenuhi kaidah dan sistematika penulisan, maka digunakan sistematika penulisan dari Bab 1 sampai dengan Bab 6 beserta muatan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini akan disampaikan pokok-pokok mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada objek dibandingkan dengan kondisi faktual objek penelitian sebelum dilakukan analisis dan pembahasan secara komprehensif.

Bab 2 : Kerangka Teori

Pada bab ini akan dibahas kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang terdapat dalam bab ini adalah tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, dan operasionalisasi konsep.

Bab 3 : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab 5 : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas dan menganalisis data primer dari hasil pengumpulan data serta relevansinya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, memberikan informasi dari data sekunder yang dapat dijadikan penunjang ketepatan penelitian.

Bab 6 : Simpulan dan Saran

Bab ini terbagi dalam dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan akan memuat hal-hal penting tentang temuan hasil penelitian, dan rekomendasi akan memuat saran teoritis dan praktis yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis dan temuan peneliti dari perspektif teoritis dan pelaksanaan penelitian.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan metode penelitian. Tinjauan pustaka menjabarkan tentang tinjauan pustaka penelitian, kerangka pemikiran menjabarkan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian.

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dibuat oleh penulis kali ini, penulis telah melihat penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan mengenai retribusi yang menjadi pokok inti dari penelitian penulis kali ini. Penelitian terdahulu yang menjadi dasar kajian literatur yang pertama merupakan tesis ditulis oleh Dedyanto (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir*” mempunyai tujuan untuk mengkaji apakah pendapatan retribusi parker yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta telah efektif, kemudian juga mengkaji sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti premanisme dan pola pengendalian pemungutan mempengaruhi efektifitas pendapatan retribusi parkir propinsi DKI Jakarta, dan juga untuk memberikan usulan pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan efektifitas retribusi parker propinsi DKI Jakarta.

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis. Data primer didapat dari wawancara dengan pejabat di lingkungan badan pengelola propinsi DKI Jakarta, pejabat di lingkungan badan pengelola perparkiran kota Bandung, serta pejabat di lingkungan Sub Dinas parker Dinas Perhubungan kota Surabaya. Wawancara juga dilakukan dengan para juru parker organik, kepala juru parkir, preman atau oknum pengelola perparkiran tidak resmi (liar), serta pengamatan ke lokasi-lokasi parker dengan fokus pada lokasi parkir on the street (pinggir jalan). Pengamatan dilakukan di lima wilayah perparkiran (kotamadya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan parkir tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BP. Perparkiran. Dengan mengacu pada efektifitas pendapatan kota Bandung dan kota Surabaya, terdapat cukup besar potensi retribusi parker propinsi DKI Jakarta yang belum efektif direalisasikan sebagai penerimaan pendapatan retribusi parker propinsi DKI Jakarta, yang berarti realisasi pendapatan parkir masih jauh di bawah potensi penerimaan parker yang sebenarnya. Pola pengendalian pemungutan dengan menggunakan sistem setoran wajib minimum (SWM) yang digunakan oleh BP Perparkiran selama ini tidak efektif. Juru parkir baik resmi maupun liar cenderung hanya membayar kewajiban minimum tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh.

Kemudian dalam penelitian kedua, mengacu pada skripsi yang ditulis oleh Diny Wibawati (2005) berjudul "*Analisis Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung*", penelitian tersebut merupakan studi pada bidang Akuntansi Sektor Publik, yaitu mengkaji efektivitas pemungutan retribusi tempat rekreasi dalam menunjang upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perkembangan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung, (2) kontribusi retribusi tempat rekreasi untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, dan (3) efektivitas pemungutan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung.

Yang menjadi unit analisis adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Daerah kabupaten Bandung, dengan objek penelitian retribusi tempat rekreasi kabupaten Bandung. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data penerimaan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung yang meliputi: (1) retribusi tempat rekreasi objek wisata Maribaya, (2) retribusi tempat rekreasi objek wisata Situ Cileunca, dan (3) retribusi tempat rekreasi objek wisata Situ Ciburuy. Data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi analisis, dilakukan wawancara dengan pengelola masing-masing objek wisata.

Hasil analisis melalui perhitungan matematis menunjukkan bahwa: (1) perkembangan penerimaan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 11,65 % per tahun; (2) kontribusi retribusi tempat rekreasi terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 0,45% dan 0,17% setiap tahunnya. Kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi oleh Taman Wisata Maribaya (94,8%); (3) Ditinjau dari potensinya, pemungutan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 tidak efektif, yaitu mencapai rasio efektivitas 56,47%. Sedangkan ditinjau dari pencapaian target, penyusunan dan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah dapat dikatakan sudah efektif.

Kemudian dalam penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lenny Marlina (2003) berjudul "*Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta*" dimana penelitian tersebut ingin menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip *cost recovery* atau belum dan bagaimanaha peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan. Jenis penelitian tersebut adalah deskriptif analitis. Subjek penelitian adalah tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, sedangkan unit analisa adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan tarif retribusi kebersihan. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis secara kualitatif.

Teori yang digunakan adalah teori tentang *public goods*, *private goods* dan *mix goods* sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai dengan pajak atau dengan retribusi. Dasar dari retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di

bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Retribusi di bawah biaya umumnya diambil bila pelayanan pada dasarnya adalah suatu *public goods*, apabila pelayanan sebagian swasta dan sebagian lagi pemerintah, pelayanan *private goods* yang dapat di subsidi dan *private goods* yang mungkin disubsidi karena merupakan kebutuhan dasar manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggambarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip *cost recovery* tidak bisa dicapai. Retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya, yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk objek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50%) dari total retribusi yang berhasil dipungut. Retribusi yang dipungut hanya bias membiayai 7,28 % dari total pengeluaran untuk pengelolaan.

Penelitian yang keempat yaitu yang ditulis oleh Levi Amos Hasudungan Silalahi (2008) yang berjudul "*Retribusi Terminal Baranangsiang sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*" dimana dalam penelitian tersebut ingin menjawab permasalahan seperti: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang? Dan bagaimana peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang? Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian deskriptif. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan Ronald C. Fischer dan James McMaster dalam menganalisa permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Teknik analisa menggunakan analisa deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Kegiatan pengelolaan Terminal Baranangsiang khususnya dalam hal pemungutan retribusi

terdapat kendala-kendala, seperti terbatasnya lahan, Terminal Baranangsiang hanya mempunyai luas lahan sekitar 2 ha seharusnya sebagai terminal penumpang tipe A luas lahan Terminal Baranangsiang sekurangnya 5 ha. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban, khususnya retribusi peron menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi Terminal Baranangsiang. Yang terakhir, sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang melanggar sudah diatur dengan baik dalam Peraturan Daerah Kota Bogor, tetapi dalam prakteknya penegakan sanksi sulit ditegakkan sebab biaya yang ditanggung pemerintah lebih besar dari penerimaan retribusi.

Keempat literatur diatas mempunyai korelasi dan memberikan tambahan pemikiran bagi penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Literatur yang pertama memberikan masukan pemikiran berupa kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian yaitu efektifitas retribusi. Literatur yang kedua memiliki masukan mengenai retribusi tempat rekreasi, yang sama-sama menjadi objek penelitian. Literatur yang ketiga membrikan kontribusi mengenai teori penetapan tarif yang juga disungung dalam penelitian ini dalam kaitannya untuk melihat efektifitas dari sebuah retribusi. Literatur yang keempat memberikan masukan berupa kerangka berpikir bagi peneliti dalam melihat kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan retribusi. Jika dibandingkan antara penelitian ini dengan literatur yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dibanding dengan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah penelitian ini menerapkan pendekatan positivis, yaitu pendekatan yang merupakan kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif dimana yang lain ada yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitaif. Sedangkan dari tujuannya juga berbeda dengan penelitian lainnya, kemudian metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sama dengan penelitian ketiga dan keempat. Jenis penelitian jika dibandingkan dengan literatur yang telah dijelaskan memiliki kesamaan yaitu penelitian deskriptif, tapi berbeda dari segi teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan antara penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
Nama Peneliti	Dedyanto	Diny Wibawati	Lenny Marlina
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji apakah pendapatan retribusi parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta telah efektif 2. Mengkaji sejauh mana pengaruh factor-faktor seperti premanisme dan pola pengendalian pemungutan mempengaruhi efektifitas pendapatan retribusi parker propinsi DKI Jakarta 3. Memberikan usulan pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan efektifitas retribusi parker propinsi DKI Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung 2. Kontribusi retribusi tempat rekreasi untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah 3. Efektivitas pemungutan retribusi tempat rekreasi di kabupaten Bandung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, 2. Mengetahui apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip <i>cost recovery</i> atau belum 3. Bagaimana peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.
Metode Pengumpulan Data	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif dan Kuantitatif
Metode analisis data	Deskriptif kualitatif	Analisis kuantitatif	Analisis kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif analisis	Deskriptif	Deskriptif-analitik
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara	Studi data, wawancara	Wawancara, studi kepustakaan

Sumber : olahan peneliti

	Penelitian Keempat	Penelitian yang dilakukan
Nama Peneliti	Levi Amos hasudungan	Tri Kurniawan P
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif	Positivis
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang. 2. Mengetahui peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tingkat efektifitas dari kebijakan pengenaan tarif yang diterapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait dengan retribusi Taman Margasatwa Ragunan 2. Menganalisis efektifitas dari pelaksanaan pemungutan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam retribusi Taman Margasatwa Ragunan
Metode Pengumpulan Data	Kuantitatif dan kualitatif	Kualitatif dan Kuantitatif
Metode analisis data	Deskriptif kualitatif	Analisis Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif analisis	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Studi kepustakaan, wawancara, observasi	Observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen

Sumber : olahan peneliti

2.2 Kerangka Teori

Dalam sub-bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam studi yang terdiri dari: evaluasi kebijakan, pendapatan asli daerah, retribusi, retribusi daerah, retribusi jasa usaha, dan efektifitas retribusi, penetapan tarif retribusi.

2.2.1 Evaluasi Kebijakan

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktifitas berurutan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2002; 165).

Studi evaluasi dapat dibagi menjadi dua yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa evaluasi sumatif adalah upaya untuk mengevaluasi program atau kebijakan yang telah selesai dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur apakah tujuan suatu program telah tercapai. Evaluasi Sumatif menekankan pada efektifitas pencapaian program yang berupa produk tertentu. Sedangkan evaluasi formatif adalah upaya mengevaluasi program atau kebijakan yang masih berjalan (*on going*) untuk mendapatkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja program atau kebijakan yang sifatnya relatif sudah baku atau stabil, Evaluasi formatif dilakukan untuk mengevaluasi program atau kebijakan yang relatif baru dan lebih dinamis (Sugiyono, 2006; 10).

Dalam melaksanakan studi evaluasi ada tiga pendekatan yang biasa digunakan (Dunn, 2000; 613-619). Berikut merupakan tabel yang menggambarkan ringkasan mengenai tiga pendekatan evaluasi:

Tabel 2.2
Tiga Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama
Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal telah diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi di umumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan, Evaluasi experimental, Evaluasi proses restropektif, Evaluasi hasil restrospektif
Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi sosial, Akuntansi sistem sosial, Pemeriksaan sosial, Sintesis riset dan praktik
Keputusan	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari para berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi, Analisis utilitas multiatribut

Sumber: (Dunn, 2000; 612)

Untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, pada tahap analisis dibutuhkan kriteria-kriteria untuk menilai kinerja kebijakan tersebut. kriteria untuk evaluasi tersebut diterapkan secara *restropektif* atau *expost*, metode ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat data/informasi sebelumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut (Dunn, 2000: 611). Kriteria evaluasi yang digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah (Dunn, 2000: 610):

a. Efektivitas (*Effectiveness*).

Menurut Kumala, pendekatan umum dalam evaluasi dalam hal ini efektivitas terdiri dari lima langkah sebagai berikut (Kumala, 1995: 334):

1. Menentukan aspek apa dari program yang akan dievaluasi

2. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memberikan bukti
3. Membandingkan hasil dengan target atau tujuan
4. Menentukan apakah dan sejauh mana target dan tujuan telah tercapai
5. Menetapkan apakah program akan diteruskan tanpa perubahan, diubah atau dihentikan

Perkataan efektivitas meskipun sering diucapkan tetapi memiliki pengertian dan makna yang berbeda, sehingga beberapa ahli berupaya untuk mendefinisikan efektivitas tersebut. Efektivitas yang bertumpu pada pendekatan tujuan diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Gibson, 1992).

Secara umum efektivitas digunakan sebagai ukuran di dalam mencapai keberhasilan usaha atau pencapaian sasaran yang ditetapkan. Menurut Jones (1996), berpendapat bahwa efektivitas menunjuk kepada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (objectivitas), sehingga efektivitas hanya berkepentingan terhadap output. Misalnya, jika sesuatu perusahaan ingin menambah mesin dan karyawannya agar dapat memenuhi permintaan pasar terhadap produknya sebanyak 500 buah, dan ternyata tujuan tersebut berhasil, maka perusahaan tersebut dikatakan efektif. Tetapi jika perusahaan itu hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar kurang dari 500 buah, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak efektif.

Efektivitas yang bertumpu pada pendekatan tujuan diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Gibson, 1992). Jadi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang luas mencakup berbagai factor baik di dalam maupun diluar organisasi. Biasanya efektivitas suatu

organisasi dilihat dari hasil (kuantitas) yang dicapai. Suatu organisasi sudah tentu melaksanakan berbagai macam kegiatan dan memiliki berbagai jenis *output*, sehingga tidak mungkin pengukuran efektivitas organisasi dilakukan dengan menggunakan kriteria tunggal (Lubis, 1987: 64).

Menurut Gibson dalam Siagian yang dikutip oleh Tanklisan mengatakan efektivitas dapat diukur sebagai berikut (Tangkilisan, 2005: 141):

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan,
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

b. Efisiensi (*Efficiency*).

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakrir umumnya di ukur dari ongkos monoter. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha/biaya minimal) untuk mencapai hasil maksimal (manfaat/keuntungan). Efisiensi dapat diukur dengan melihat banyaknya input yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu output. Semakin sedikit input yang dilakukan oleh organisasi dan menghasilkan output yang semakin besar maka organisasi tersebut dikatakan semakin efisien. Untuk mengukur efisiensi tersebut parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

Menurut Jones Pendlebury, rasio dapat dilihat dari perbandingan antara output dengan input (Jones, 1996: 9). Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \text{Output} / \text{Input}$$

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara (Arifin 2003: 21)

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
 - b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
 - c. Menurunkan input pada tingkat input yang sama
 - d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output
- c. Kecukupan (*adequacy*)

Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penilaian terhadap *adequacy* ditujukan untuk melihat seberapa jauh program atau kebijakan yang diterapkan mampu dan tepat untuk memecahkan dan menjawab masalah.

- d. Kriteria kesamaan (*equity*)

Kriteria kesamaan ditujukan untuk melihat dan mencari tahu apakah biaya dan manfaat dari program atau kebijakan yang diterapkan terdistribusi secara proporsional untuk setiap *stakeholders* yang terlibat.

- e. Responsivitas (*responsiveness*)

Kriteria *responsiveness* digunakan untuk menilai apakah hasil dari program atau kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan, preferensi atau sistem nilai kelompok yang menjadi objek program atau kebijakan. Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil

rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

f. Ketepatan (*appropriateness*).

Kriteria ketepatan digunakan untuk menilai apakah tujuan dari nilai program atau kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat secara normatif. Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pembahasan kedua yang akan dipaparkan adalah mengenai pendapatan daerah, dimana retribusi adalah satu bagian dari pendapatan daerah, maka dari pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai pendapatan daerah. Salah satu dampak penerapan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal adalah perlunya dilakukan manajemen keuangan Daerah secara menyeluruh. Lingkup Manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan atau pendapatan daerah.

Manajemen pendapatan daerah harus dikelola secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pendapatan daerah telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah melalui sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen pendapatan daerah yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002 : 144).

Sesuai dengan asas desentralisasi, maka agar daerah dapat memmanajemi pendapatan daerah sendiri sebaik-baiknya, maka kepala daerah yang bersangkutan perlu diberikan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup. Namun, mengingat kebutuhan anggaran negara dalam melaksanakan tugas nasional dan asas-asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang

dapat diserahkan kepala daerah adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan pendapatan daerahnya sendiri, sesuai dengan dan dalam batas-batas ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. Kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.

Secara konsepsional, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya. PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang diakibatkan oleh tindakan Kepala Daerah selaku penguasa. Batasan ini didasarkan pada kepala Daerah selaku penguasa anggaran dapat mengambil tindakan yang dapat berakibat pada anggaran baik pendapatan atau pembelanjaan (Abdullah, 1984 : 21).

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis. Sujamto (1990:20) menyatakan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri”. Kemudian Sutrisno (1985:45) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-sumber pendapatan lainnya”.

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan;
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar;
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada kabupaten atau kota, maka Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali kemampuan rumah tangganya sendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD adalah mutlak diperlukan dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang lebih nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah mengetahui mengenai pendapatan asli daerah dimana salah satu

komponen dari pendapatan asli daerah adalah retribusi, maka lebih lanjut akan dijelaskan mengenai teori perihal retribusi.

2.2.3 Retribusi

Berawal dari pendapat James McMaster (1991), seorang pengajar ilmu ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Australia, menyatakan retribusi didasari atas dua prinsip, yaitu :

The first is the "benefit principle." Under this principle, those who receive direct benefits from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. The second, and equally valid criterion, is known as the "ability-to-pay principle." Charges based on this principle are related to the financial capacity of households to pay for urban services. Low-income households are charged a lower rate per unit of service than higher income groups. If a service benefits everybody collectively and indiscriminately, such as defense or disease control, the cost is borne by taxation. (McMaster, 1991, 23)

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah "*benefit principle*". Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah "*ability-to-pay principle*", berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga yang dikenakan dibanding dengan mereka yang tinggi penghasilannya.

Lebih lanjut, Ronald C. Fisher (1996), seorang ahli keuangan negara dan daerah menyatakan teori retribusi sebagai berikut :

In theory, the use of charges and fees should accomplish at least two broad goals. First, it should make the recipient of a service face the true cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fees is to reduce expenditure pressures on general taxes. (Fischer, 1996, 179)

Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. Tujuan yang kedua pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Devas berpendapat, bahwa retribusi daerah haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sepadan.

Lebih lanjut Zorn mengatakan bahwa terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dapat dikenakan atas suatu barang atau jasa :

Three necessary conditions must be satisfied before user charges can be employed to finance a good or service-benefit separability, chargeability, and voluntarism. First, there must be an identifiable set of individuals or firms, not the whole community, that directly benefits from provision of the good. Second, it must be possible to exclude individuals from consuming the goods if they do not pay. Third, individuals must have the right to choose whether to consume the good. (Zorn, 1991, 143)

Terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yaitu pemisahan

kenikmatan, dapat dikenakan pungutan, dan sukarela. Ketiga kondisi tersebut tidak terdapat dalam *pure public goods* tetapi terdapat di *pure private goods*. Dengan demikian, kelayakan pengenaan retribusi lebih sesuai terhadap *private goods* daripada *public goods*.

Kemudian Sularno dalam bukunya menyatakan, bahwa retribusi adalah pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada orang/badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan berhubungan dengan jasa timbal (kontra prestasi) yang diberikan secara langsung, atas permohonan dan untuk kepentingan orang/badan yang memerlukan, baik prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, pungutan retribusi selalu dikaitkan dengan adanya layanan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah, atau yang sering disebut dengan kontra prestasi. Demikian pula, layanan yang diterima tersebut bersifat pribadi. Hanya orang-orang tertentu yang bersedia membayar retribusi yang berhak mendapatkan layanan tersebut. Sedangkan orang-orang yang tidak membayar retribusi, tidak memiliki hak untuk memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pada dasarnya, dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan;
- Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan;
- Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan

Menurut Davey (1983, 148) bahwa azas pemungutan retribusi terdiri dari kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, dan kesepakatan politis.

- a. Penilaian kecukupan dan elastisitas dimana sumber pendapatan itu haruslah menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan, juga dapat mencukupi untuk membiayai kegiatan pelayanan

pemerintahan daerah tersebut. Namun pada prakteknya retribusi tunduk pada variasi yang demikian bahwa generalisasi daripada skala kontribusinya kepada penerimaan pemerintah daerah akan menjadi kurang berarti, dimana pajak daerah masih menjadi prioritas utama bagi penerimaan daerah. Akan tetapi masalah yang timbul adalah pada elastisitas dimana pada umumnya retribusi haruslah responsif terhadap jumlah penduduk, dan hal-hal yang amat berpengaruh pada retribusi tersebut.

- b. Penilaian keadilan, menunjukkan seharusnya retribusi bersifat regresif secara tradisional, karena merupakan kebutuhan dasar seringkali menguntungkan kelompok menengah keatas serta biaya modal dari instalasi diselesaikan tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi. Dalam hal pemerataan, retribusi tidak dapat dipandang sebagai suatu alat, bahkan tidak efisien untuk tujuan pemerataan karena konsumsi tidak berhubungan proporsional dengan pendapatan.
- c. Penilaian kemampuan administrasi, berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan pengontrolan pemungutan, melakukan sanksi terhadap pelanggaran retribusi, dan integritas bagi pemungut terutama jika hendak mengecek yang telah diterima oleh pemungut.
- d. Penilaian kesepakatan politis, terutama pada penetapan tarif. Dimana tingkat tariff sangat sensitive terhadap preferensi masyarakat.

Dari gambaran-gambaran singkat mengenai teori retribusi di atas, yang menjadi poin penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar retribusi. Obyek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar. Untuk lebih jelas lagi mengenai retribusi maka akan dibahas kemudian mengenai retribusi daerah.

2.2.4 Retribusi Daerah

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai retribusi maka sangat perlu dilakukan pemahaman mengenai barang publik dan barang pribadi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan perlunya melakukan pungutan retribusi oleh pemerintah daerah. Menurut Roy V. Salomo, barang publik adalah barang yang bila dikonsumsi oleh seseorang atau individu tidak akan mengurangi kesempatan bagi individu lainnya untuk mengkonsumsinya. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu *non excludable* dan *non rival*. Sifat *non excludable* berarti bahwa penyediaan barang-barang tersebut tidak dapat dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu yang bersedia membayarnya saja.

Seseorang akan tetap dapat menikmati manfaat barang publik meskipun ia tidak bersedia membayar sama sekali, dengan kenikmatan yang sama dengan orang yang bersedia membayar. Sifat *non rival* adalah bahwa manfaat barang publik tersebut dapat dinikmati oleh satu orang atau lebih pada saat yang bersamaan. Konsumsi barang tersebut oleh satu orang tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain.

Contoh barang publik adalah pertahanan dan keamanan, jalan umum, taman dan lain-lain. Barang-barang ini disediakan untuk semua orang tanpa terkecuali. Setiap orang dapat dengan bebas memanfaatkan dan merasakan ketersediaan barang tersebut, walaupun tanpa membayarnya. Pemanfaatan barang-barang tersebut dapat dilakukan secara bersama dan tanpa mempengaruhi ketersediaannya bagi orang lain.

Barang pribadi bersifat *exclude* dan *rival*. Barang pribadi hanya disediakan bagi orang-orang yang bersedia membayarnya. Pemilik barang pribadi dapat menikmati barang tersebut secara pribadi dengan menyingkirkan atau mengecualikan (*exclude*) orang lain untuk turut menikmatinya. Demikian pula, apabila barang pribadi telah dinikmati oleh seseorang maka akan menghilangkan atau mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut (bersifat *rival*).

Hal yang lain dari ciri-ciri barang pribadi ialah tidak boleh adanya eksternalitas dalam memproduksinya, artinya pada saat diproduksi dan dikonsumsi tidak boleh mengakibatkan orang lain memperoleh keuntungan maupun kerugian. Jika akibat memproduksi maupun mengkonsumsinya terdapat eksternalitas maka harus segera diinternalkan dengan kompensasi atau ganti rugi maupun pajak. “Prinsip pengecualian (*Exclusion Principle*) diterapkan, yaitu dimana konsumsi tergantung pada apa yang dibayarkan, sedangkan konsumsi bagi yang tidak membayar dikesampingkan.

Pada tabel berikut ini disajikan perbedaan antara barang publik, barang semi publik, dan barang pribadi.

Tabel 2.3.

Perbedaan Antara Barang Publik, Barang Semi Publik, dan Barang Pribadi

Jenis barang	Barang Publik	Barang Semi Publik	Barang Pribadi
Siapa yang memanfaatkan	Seluruh masyarakat	Pelanggan dan masyarakat	Individual konsumen
Pengecualian dari yang tidak membayar	Sangat tidak mungkin	Kadang-kadang	Sangat mungkin
Kemungkinan diberlakukannya tarif	Tidak mungkin	Mungkin	Mungkin
Pilihan konsumen	Tidak ada	Kadang-kadang	Penuh
Siapa yang membiayai konsumsi	Dibayar oleh pajak	Sebagian dibayar oleh konsumen dan sebagian lainnya disubsidi	Konsumen membayar penuh
Hubungan antara pembayaran dan konsumen	Tidak ada	Dekat	Amat dekat
Siapa yang memutuskan memproduksi	Hanya pemerintah	Pasar dan pemerintah	Hanya pasar

Sumber : Guritno, Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPF, 2001, hal 5.

Pelayanan terhadap pengadaan barang tersebut oleh pemerintah dibiayai oleh sumber yang berbeda. Dalam hal pembiayaan untuk penyediaannya, secara

teoritis *public goods* karena pemanfaatannya dapat dinikmati secara bersama, maka harus dibiayai sepenuhnya dengan pajak (pajak daerah), dan sebaliknya *private goods* yang kemanfaatannya dapat dinikmati secara pribadi harus dibiayai dengan retribusi.

Namun pada kenyataannya usaha-usaha yang dilakukan oleh swasta dalam menyediakan barang publik tersebut masih terlalu langka, hal ini disebabkan karena caracara mengutip pembayaran dari pemakainya akan menimbulkan ketidakefisienan dalam perekonomian dan menimbulkan biaya sosial yang besar sekali. Oleh sebab itu adalah lebih tepat apabila pembiayaan untuk penyediaan jasa dan kegiatan tersebut dipungut melalui retribusi daerah.

Selanjutnya Fischer menyatakan, bahwa terdapat empat prinsip umum dalam melakukan pengenaan retribusi atas barang publik dan barang pribadi, yaitu :

1. *User charge financing becomes more attractive as the share of marginal benefits that accrues to direct users increases.*
2. *User-charge financing requires that direct users can be easily identified and excluded (at reasonable cost) from consuming the service unless the charge is paid, assuming that most of the benefits of a service or facility go to direct users.*
3. *The efficiency case for user-charge financing is stronger when demand is more price elastic. In the special case of a perfectly inelastic (vertical) demand, price does not matter. No inefficiency would result if consumers underestimate cost. Obviously, the more price elastic demand is, the greater the potential for inefficiency if consumers do not face true costs.*
4. *Marginal benefits, not total benefits, matter for determination of user charges. (Fischer, 1996, 179)*

Selain kegiatan penyediaan barang publik dan barang pribadi, terdapat juga kegiatan yang pada umumnya hanya dilakukan oleh pihak pemerintah akan tetapi sebelumnya masih dapat dijalankan oleh pihak swasta dan sering disebut dengan barang semi publik yaitu penyediaan barang publik oleh pihak swasta disebabkan karena pihak swasta tersebut masih dapat memungut pembayaran dari hasil kegiatan maupun jasa-jasa yang telah dihasilkannya, kegiatan itu antara lain ialah penyediaan jasa-jasa perizinan membangun, sampah, parkir, pendidikan, dan juga pemakaian kekayaan daerah.

Menurut Davey, retribusi diartikan sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelaksanaannya. Kemudian Suparmoko menyatakan bahwa, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Terdapat perbedaan dari seluruh pengertian-pengertian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari retribusi adalah :

- 1) Retribusi dipungut oleh negara atau pemerintah daerah kepada masyarakat yang tidak dapat dipaksakan
- 2) Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Pembayarannya mendapatkan imbalan jasa atau kontrapretasi langsung
- 4) Hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara atau kepentingan-kepentingan publik.

Penentuan tarif adalah fungsi administratif yang penting dalam hal pemungutan retribusi. Kesadaran pemerintah daerah dalam menentukan alokasi biaya diantara obyek retribusi sangat diperlukan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang membuat dibedakannya pembiayaan yang dilakukan dengan berdasarkan pajak dan retribusi, antara lain (Davey, 133) :

- a. Sulitnya membedakan definisi antara barang publik dan barang pribadi.

- b. Aplikasi logis dan peraturan sering melibatkan pembayar pajak, di dalam pembayaran sesuatu yang melebihi kas pemerintah maupun batasan dari pikiran sehat.
- c. Adanya pembatasan bagi orang-orang yang mampu membayar.
- d. Sebagai pengendalian bagi masyarakat untuk berhati-hati mengkonsumsi barang-barang umum yang langka.
- e. Untuk memudahkan pemungutan (lebih efisien)

2.2.5 *Specific Benefit Charge*

Karena penelitian ini membahas mengenai retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang merupakan salah satu jenis dari retribusi jasa usaha, maka akan lebih lanjut dibahas mengenai teori retribusi jasa usaha. Retribusi Jasa usaha merupakan pungutan yang mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk kepada pemerintah daerah akibat keuntungan layanan yang disediakan. Layanan yang diberikan pemerintah tidaklah berupa produk administrasi, melainkan juga produk jasa yang biasa disediakan oleh sector swasta, contohnya antara lain retribusi terhadap penggunaan pemakaian kekayaan daerah, retribusi bidang pariwisata, retribusi pertokoan, dan lainnya.

Objek dari *specific benefir charge* adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dengan konsep komersial maka pelaksanaan dari retribusi jasa usaha dapat menganut apa yang dilakukan oleh sektor swasta terutama dalam pengelolaan keuangannya, karena retribusi jasa dapat menghasilkan profit untuk pemerintah daerah. Walaupun pemerintah dapat meningkatkan margin harga untuk memperoleh keuntungan, namun pemerintah juga tidak bisa lepas begitu saja terhadap peran-peran dari pemerintahan yang difokuskan untuk pelayanan pada masyarakat, maka dari itu dalam pemungutan

retribusi jasa usaha, pemerintah juga tidak lepas dari kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

2.2.6 Efektivitas Retribusi

Menurut Nick Devas terdapat tiga tolak ukur dari kinerja anggaran yang berkaitan dengan pajak/retribusi yaitu terdiri dari hal-hal seperti: upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*), hasil guna (*effectiveness*), daya guna (*efficiency*). Berikut merupakan penjelasan dari tolak ukur tersebut:

1. Upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*)

Upaya pajak/retribusi adalah hasil dari suatu sistem pajak/retribusi, teori ini dikemukakan oleh Nick Devas yang berbeda dengan teori *tax effort* dalam ilmu perpajakan, dimana dalam teori ini berkaitan dengan peraturan maupun undang-undang yang mengatur pajak/retribusi dan juga organisasi yang melaksanakan kegiatan pajak/retribusi tersebut. Sehingga upaya pajak/retribusi lebih banyak mengangkat sistem pajak/retribusi secara keseluruhan yang lebih luas daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak/retribusi.

2. Hasil guna (*effectiveness*)

Hasil guna menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak/retribusi yaitu menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai kena pajak/retribusi, menetapkan tarif pajak/retribusi, memungut pajak, menegakan sistem pajak/retribusi, dan membukukan penerimaan pajak/retribusi. Ada beberapa faktor yang mengancam hasil guna, antara lain menghindari pajak/retribusi kolusi antara petugas pajak/retribusi dan wajib pajak/retribusi, untuk mengurangi pajak/retribusi terhutang dan penipuan oleh petugas pajak/retribusi.

Efektifitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas pemungutan pajak/retribusi dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi

pengelola retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang direncanakan. Akan tetapi, untuk dapat memungut retribusi tersebut dibutuhkan berbagai kegiatan/usaha. Untuk dapat mengadakan studi dan analisis yang mendetail tentang efektifitas tersebut, model yang digunakan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan-satuan kegiatan/subunit organisasi tersebut. Secara makro, efektifitas pemungutan retribusi dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan/target. Secara sederhana efektifitas pemungutan retribusi yang dikenal dengan (indeks kinerja retribusi/IKR) ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{IKR} = \frac{\text{Realisasi.Penerimaan.Retribusi}}{\text{Target.Penerimaan.Retribusi}}$$

Semakin besar IKR menunjukkan semakin efektif pemungutan retribusi dihubungkan dengan sasaran yang akan diperoleh (Slamet Sularno 2000, 77).

3. Daya guna (*efficiency*)

Daya guna adalah mengukur biaya yang digunakan untuk memungut pajak/retribusi yang diambil dari hasil pajak dan retribusi yang bersangkutan. Biaya tersebut antara lain: biaya kantor, biaya operasional, penyuluhan kepada para wajib pajak/retribusi dan upah pungut. Pengukuran efisiensi di bidang perpajakan/retribusi dapat dilihat melalui metode Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP). Pada umumnya REBP diukur dengan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Semakin besar REBP tersebut memberikan indikasi semakin efisien penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi ekonomis dalam pemungutan retribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{REBP} = \frac{\text{Hasil Retribusi}}{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}} \times 100\%$$

Penggunaan formula ini akan memberikan gambaran berupa presentase biaya yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan. Formula tersebut diatas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi secara regional, per jenis retribusi, dan kombinasi regional dan jenis retribusi (Slamet Sularmo 2000, 77)

Menurut Soedjadji (1989, 37-38) efesiensi dan efektifitas suatu organisasi tercermin dalam :

1. Berhasil guna (efektif), dalam hal ini bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan (*target achieved*).
2. Ekonomi adalah bahwa didalam pencapaian efektif itu maka, biaya keuanagn dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagai yang telah diterapkan dalam perencanaan dan tidak terjadi pemborosan-pemborosan, penyelewengan-penyelewengan.
3. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsible performance*) yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan tidak terjadi pemborosan-pemborosan maka kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan itupun haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam perencanaan, jadi haruslah ada system pertanggungjawaban yang tepat, objektif menurut data dan fakta (*factual*) yang dapat dipercaya (*reliable*).
4. Pembagian kerja yang nyata (*real and factual distribution of work*) yakni berdasarkan logika bahwa tidak mungkin seorang manusia sendiri mengerjakan segala macam pekerjaan dengan baik, sebab

bagaimanapun juga kemampuan setiap orang pasti terbatas, karena itu dalam organisasi azasnya harus ada pembagian kerja yang nyata yaitu benar-benar berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

5. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab (*rationality of authority and responsibility*) artinya jangan sampai terjadi seseorang mempunyai wewenang yang lebih besar dari tanggung jawabnya, dan sebaliknya. Azasnya adalah bahwa wewenang harus sama dan seimbang dengan tanggung jawab.
6. Prosedur kerja yang praktis dapat dikerjakan dan dapat dilaksanakan (*practicable, workable & applicable procedurs*).

2.2.7 Penetapan Tarif Retribusi

Perkiraan Biaya

Menurut Davey (1988 : 139) dasar dari retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai besarnya tarif retribusi dapat diambil kurang dari *full cost* atau diatas *full cost*. Masalah utama yang dihadapi dalam mengkalkulasikan *full cost* dari pelayanan adalah:

1. Pengeluaran-pengeluaran apa yang dapat dihubungkan sebagai biaya bagi suatu pelayanan tertentu.
2. Apakah biaya-biaya dikalkulasi sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya dari suatu unit pelayanan tertentu atau berdasarkan suatu rata-rata pelayanan bersama.
3. Di dalam perkiraan biaya, apakah biaya modal dimasukan dan dengan dasar apa. Ada contoh pelayanan yang diartikan sebagai membiayai diri sendiri (*self financing*), tetapi hanya biaya-biaya pemeliharaan dan operasi yang dibebaskan kepada konsumen.

Dengan demikian ada berbagai variasi di dalam pelaksanaan perkiraan biaya, yaitu sebagai berikut:

- Retribusi di Bawah Biaya

Ada empat alasan utama mengapa hal ini terjadi :

1. Timbul apabila suatu pelayanan pada dasarnya adalah suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi suatu retribusi harus dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi, contohnya adalah air minum.
2. Untuk subsidi yang terjadi apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan bagian dari *public good* contohnya antara lain adalah kereta api atau bus.
3. Pelayanan dimana seluruhnya merupakan *private goods* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan yang populer dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*-nya, contohnya adalah fasilitas rekreasi.
4. *Private goods* mungkin disubsidi sebab hal itu dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, pada tingkat konsumsi minimum dari kategori pemakai tertentu atau berpenghasilan rendah.

- Retribusi di Atas Biaya

Di dalam beberapa hal retribusi mungkin lebih didasarkan pada *recovering* daripada *full cost* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan. Hal ini bias terjadi karena:

1. Retribusi dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung, contohnya adalah meteran parkir.
2. Retribusi mungkin dikenakan pada tingkat diatas biaya guna memperkuat disiplin mereka atas konsumsi.
3. Suatu pelayanan mungkin mempunyai permintaan yang cukup banyak dan penduduk ingin membayar tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitasnya dan keterbatasan suplainya.

Berdasarkan metode Hopkinson (OECD 1987 : 37), biaya untuk penyediaan barang publik dapat diklasifikasikan atas empat, yaitu:

1. Biaya konsumen (*costumer cost*), biaya ini berasal dari jumlah unit pelayanan dan ukuran permintaan.
2. Biaya komoditi (*commodity cost*), biaya komoditi berbeda-beda tergantung akan jumlah unit yang dikonsumsi.
3. Biaya kapasitas (*capacity cost*), adalah biaya yang diperoleh dari penyediaan sumber daya, distribusi, *treatment work*, dll yang disesuaikan dengan permintaan tetapi jarang terlihat dalam tarif.
4. Biaya umum (*common cost*), menyangkut semua ketentuan biaya dimana itu tidak mengubah penggunaan dan system beban dan tidak berhubungan dengan biaya sambungan *costumer* terhadap sistem *supply*.

Sedangkan menurut Fisher (1996 : 181) biaya yang harus diperhatikan untuk penyediaan barang public adalah sebagai berikut :

1. Biaya modal, merupakan biaya konstruksi atau akuisisi fasilitas umum harus dibayar oleh sejumlah kelompok masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari keberadaan fasilitas tersebut, yang mungkin saja berbeda antara mereka yang memperoleh manfaatnya secara langsung dengan yang tidak langsung.
2. Biaya operasional, bila fasilitas umum seperti taman, jalan, air, atau bahkan perguruan tinggi sudah tersedia maka yang harus diperhatikan adalah penutupan biaya variable atau biaya operasional, caranya dengan menentukan berapa banyak dan siapa yang menggunakan fasilitas tersebut.
3. Biaya kemacetan, untuk sebagian pelayanan seorang konsumen tambahan bias membebankan biaya ekstra terhadap pengguna yang lainnya yang disebut biaya kemacetan, bila jalan dan jembatan menjadi macet maka lalu lintas menjadi lambat dan biaya (waktu) ikut meningkat.

Penetapan Tarif Pelayanan

Berdasarkan informasi biaya pelayanan, maka pemerintah dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pelanggannya (Suparmoko 2002 : 42). Dalam praktek, pembebanan tarif pelayanan biasanya ditentukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Suatu jasa, baik merupakan barang-barang public atau privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada semua orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut.
2. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya langka atau mahal sehingga perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
3. Mungkin ada beberapa variasi dalam konsumsi individu, sehingga terdapat pilihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, contohnya seperti tempat rekreasi.
4. Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestic secara industrial misalnya adalah air, listrik, telepon.
5. Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan masyarakat atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas.

Sebagian barang dan jasa disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif, semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenakan tarif. Meskipun demikian dalam prakteknya permasalahan administrasi dan pertimbangan social dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang (Devas 1989 : 100).

Prinsip-prinsip dalam penetapan tarif untuk pelayanan umum dikenal beberapa prinsip (OECD 1987 : 23) yaitu :

1. *Allocative efficiency*

Pelayanan yang diberikan harus memaksimalkan keuntungan yang diperoleh masyarakat. Idealnya hal ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dimana pelayanan yang diberikan harganya dapat ditetapkan. Harga harus merefleksikan biaya tambahan kepada pelanggan, sistem retribusi seperti ini biasanya dikenal dengan *marginal cost pricing*.

2. *Equity*

Dapat diidentifikasi dengan dua pengertian, yang pertama merupakan distribusi pendapatan dalam masyarakat dimana diperlukan kebijakan pemerintah, dan yang kedua merupakan aturan dari sistem yang cocok untuk retribusi adalah dengan pelayanan masyarakat dan biaya yang dibebankan kepada konsumen.

3. *Financial Requirements*

Urusan keuangan biasanya berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan untuk biaya operasi dan biaya pelayanan atau beberapa utang yang dihubungkan dengan pengeluaran modal. Pemerintah pada masa inflasi membiarkan untuk merubah tarif retribusi asal saja untuk biaya depresiasi seperti kesempatan untuk memperoleh modal dari sektor publik.

4. *Public Health*

Sistem retribusi sebaiknya tidak didisain atau dioperasikan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

5. *Environmental Efficiency*

Ketika sistem tarif dilaksanakan, penggunaan yang rasional dan pemeliharaan lingkungan memerlukan biaya untuk penyediaan pelayanan yang terlihat pada tarif. Bila kegiatan produksi naik tanpa diprediksi akan menimbulkan dampak lingkungan maka diperlukan pengawasan secara langsung.

6. *Consumer Acceptability and Understanding*

Sistem retribusi harus disebarluaskan kepada konsumen dan aturannya dapat diterima secara luas diantara mereka.

7. *Administrative Cost*

Suatu sistem tarif tidak boleh dipaksakan untuk biaya administrasi skala besar secara terus menerus bila tidak ada tambahan biaya untuk efisiensi, kewajiban, hasil pajak atau untuk kesehatan masyarakat.

8. *Energy*

Dalam beberapa hal tertentu yang berhubungan, sebaiknya dibayar konsekuensi energi yang digunakan dimana terlihat pada skema tarif retribusi.

9. *Employment*

Pemerintah harus memilih pegawai secara objektif dan terpadu dengan daftar harga dan target keuangan sejalan dengan kewenangan pengelolaan pelayanan tarif.

Beberapa contoh strategi harga yang digunakan untuk pelayanan publik dapat dilihat sebagai berikut (Mardiasmo : 2002 : 118) :

1. *Two-part tariffs*

Banyak pelayanan publik seperti listrik dipungut dengan *two-part tariffs* yaitu *fixed charge* untuk menutup biaya *overhead* atau biaya infrastruktur dan *variable charge* yang didasarkan atas besarnya konsumsi.

2. *Peak-load tariffs*

Pelayanan public dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan, tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan *higher marginal cost*.

3. Diskriminasi harga

Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan (*equity*) melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok

dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang dapat disubsidi silang dengan kelompok dengan pendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin.

4. *Full cost recovery*

Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan public perlu mempertimbangkan keadilan (*equity*) dan kemampuan publik untuk membayar.

5. Harga diatas *marginal cost*

Dalam beberapa kasus sengaja ditetapkan harga diatas *marginal cost* seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perijinan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjabarkan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, metode dan strategi penelitian dan operasionalisasi konsep. Metode di dalam penelitian merupakan hal mutlak, karena didalamnya terdapat teknik penelitian dan pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya penelitian. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikemukakan Bailey (1994, 34) bahwa:

“Method mean the research technique or tool used together data. Methodology mean the phylosophy of the research process. This includes the assumptions and values that serve as a rationable for research and the standards or criteria the researchers uses for interpreting data and reaching conclusions.”

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu proses penelitian. Yang dimaksud dengan metode penelitian ialah semua asas, peraturan, dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan (Dolet Unaradjan, 2000).

3.1 Pendekatan Penelitian

Mengacu kepada jenis data dan analisisnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis dimana dalam penelitian merupakan pencampuran antara kualitatif dan kuantitatif. Dengan menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell (1994, 82):

“.....in quantitative paradigm of research, in which researchers use accepted and precise meaning, a theory commonly is understood to have certain characteristic.....”

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian *Analisis Efektifitas Tarif Retribusi Taman Margasatwa Ragunan* adalah menggunakan pendekatan positivis. Pendekatan positivis ini berarti peneliti menggunakan dasar-dasar teori yang kemudian dituangkan ke dalam operasionalisasi konsep untuk dijadikan acuan dalam pembuatan wawancara. Fokus penelitian ditujukan hanya pada variabel tertentu, yaitu efektifitas tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan di DKI Jakarta.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian mengenai Efektifitas tarif Retribusi Taman Margasatwa Ragunan termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Nana, 2006). Tidak hanya sebatas deskripsi, tetapi juga terdapat analisis yang dilakukan guna menciptakan hasil penelitian yang mampu mengatasi probematika yang ada pada penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena penelitian ini berorientasi akademis dan menjelaskan pengetahuan tentang kehidupan sosial, dalam hal ini mengenai analisis efektivitas retribusi Taman Margasatwa ragunan. Penelitian murni bertujuan untuk mengecek (memvalidasi) prinsip-prinsip atau pernyataan-pernyataan (proposisi) umum dan menambah isi himpunan pengetahuan mengenai suatu gejala dan tujuan akhirnya untuk penyusunan teori (Nana, 2006).

Berdasarkan waktu, penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, yakni metode pengumpulan data di mana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu (Ronny, 2004). Penelitian ini dilaksanakan pada satu kurun waktu di propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif di mana peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini tidak lain adalah mengenai tarif retribusi taman margasatwa ragunan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan unit analisis adalah Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan yang merupakan unit operasional menjalankan kegiatan retribusi taman margasatwa ragunan, dan juga badan pengelola keuangan daerah provinsi DKI Jakarta yang mengelola keuangan terkait dengan retribusi tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau instrument penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif melalui:

a. Wawancara Mendalam

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Irawan Soeharto, 1995). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Dalam studi lapangan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sumber penilaian dalam rangka menganalisis efektivitas retribusi Taman margasatwa Ragunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Kepala sub bidang retribusi dan pendapatan lain-lain Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) propinsi DKI Jakarta, dijadikan menjadi narasumber karena yang bersangkutan merupakan pihak yang mengerti dan mengelola dari setiap pendapatan yang diterima melalui kegiatan retribusi di pemerintah DKI Jakarta.

2. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan, dijadikan menjadi narasumber karena yang bersangkutan merupakan yang menjalankan kegiatan retribusi tersebut dan juga mengetahui info yang factual mengenai setiap kegiatan retribusi TMR.
3. Kepala Seksi sinkronisasi retribusi daerah direktorat pajak daerah dan retribusi daerah, dijadikan sebagai narasumber untuk mengetahui pendapat dari pemerintah pusat mengenai kegiatan retribusi TMR.
4. Perwakilan dari Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, dijadikan sebagai narasumber untuk mengetahui kondisi secara umum mengenai kebun binatang yang ada di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan di Ragunan secara khususnya.
5. Perwakilan dari Lembaga perjuangan hak konsumen Indonesia, dijadikan sebagai narasumber untuk mengetahui pendapat dari pihak lembaga non-pemerintahan mengenai kegiatan retribusi TMR.
6. Masyarakat pengunjung taman margasatwa ragunan, untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai kegiatan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta di TMR.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa dokumen maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, majalah, yang sifatnya dokumentasi (Masri, 1989). Data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari bahan-bahan yang berasal dari dokumen-dokumen Pemda DKI Jakarta, buku, skripsi, tesis, situs-situs internet, dan data-data penunjang lainnya. Peneliti menggunakan studi dokumen untuk menambah data dan/atau informasi yang menunjang penelitian ini.

c. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti harus melibatkan semua panca inderanya. Peneliti harus mampu mengetahui suatu kejadian baik yang terlihat nyata maupun yang tidak.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisa secara deskriptif adalah teknik analisa yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian (Nazir, 1994)

3.5 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas terkait dengan tolak ukur dari kinerja anggaran yang berkaitan dengan retribusi yaitu terdiri dari hal-hal seperti upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*), hasil guna (*effectiveness*), daya guna (*efficiency*). Kemudian peneliti juga menambahkan prinsip-prinsip dalam penetapan tarif yang ditujukan untuk pelayanan umum, penggunaan teori prinsip dalam penetapan tarif ini ditujukan karena peneliti juga membahas mengenai tarif. Dari teori tersebut maka dibuatlah sebuah operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator	Sub-Indikator
Efektifitas	Efektifitas Retribusi	Sudah efektif / belum efektif	1. <i>Tax/charge effort</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan retribusi daerah - Peraturan daerah yang baik dalam menjadi acuan pelaksanaan retribusi - Pengelola dapat mengatasi hambatan yang ada
			2. <i>Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemungutan retribusi yang ada dijalankan dengan lancar - Pembukuan dari penerimaan retribusi dilaporkan dan disampaikan ke pusat oleh pengelola dalam jumlah yang sesuai - Realisasi penerimaan retribusi lebih besar dari target retribusi
			3. <i>Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari retribusi harus mendapatkan keuntungan untuk menutupi biaya pemungutan - Biaya operasional dapat dipenuhi dari hasil retribusi - Tidak mengalami defisit anggaran
			4. <i>Pricing</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenaan tarif dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat - Tarif yang ditetapkan dapat memaksimalkan kualitas pelayanan - Tarif yang ditetapkan adil kepada semua lapisan masyarakat - Pengenaan tarif tidak berdampak buruk pada lingkungan - Tarif yang ditetapkan merupakan tarif yang ideal untuk dapat melaksanakan kegiatan Taman Satwa

BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Taman Margasatwa Ragunan

Pada tahun 1864 di jaman pemerintahan Hindia Belanda, suatu perkumpulan penyayang flora dan fauna yang menamakan dirinya "*Culture Vereniging Plantenen Dierentuin et Batavia*" mendirikan kebun binatang yang bernama "*Plantenen En Dierentuin*" berlokasi di jalan Cikini Raya 3. Kebun binatang ini berdiri di atas tanah seluas 10 Ha sumbangan dari R. Saleh seorang perkumpulan penyayang flora dan fauna tersebut. Beliau juga terkenal sebagai salah satu seorang pelukis bangsa kenamaan di Indonesia pada waktu itu.

Pada tahun 1949 nama "*Plantenen En Dierentuin*" di Indonesiakan menjadi Kebun Binatang Cikini. Keberadaan Kebun Binatang Cikini hanya berlangsung sampai tahun 1964 karena perkembangan kota semakin pesat sebagai ibukota Jakarta dan lokasi tersebut tidak sesuai dengan planologi kota, maka pemerintah DKI Jakarta segera mencari lokasi pemindahannya. Akhirnya di tahun 1964 pemerintah DKI Jakarta memutuskan daerah Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatang sebagai lokasi pemindahannya. Mula-mula Kebun Binatang di Ragunan ini menempati areal seluas ± 10 Ha, yang pada saat ini pengembangan areal lokasi hingga mencapai 140 Ha.

Taman Margasatwa Ragunan beberapa kali berganti nama khususnya yang berkaitan dengan unit pengelolanya, pada tahun 1966 tepatnya tanggal 22 Juni, Kebun Binatang Ragunan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Mayor Jendral Ali Sadikin dengan nama "Taman Margasatwa". Perkembangan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1974 bertepatan dengan peringatan hari Kota Jakarta, Taman Margasatwa diubah dan diresmikan namanya oleh Gubernur DKI Jakarta, Mayor Jendral Ali Sadikin menjadi Kebun Binatang Ragunan DKI Jakarta dan dipimpin oleh Benjamin Galstaun direktur pertama waktu itu. Pada tahun 1983 berubah namanya menjadi Badan Pengelola Kebun Binatang Ragunan. Kemudian berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 13 tahun

1998, maka nama Kebun Binatang Ragunan di kembalikan lagi menjadi “Taman Margasatwa Ragunan DKI Jakarta”. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2009 sesuai dengan peraturan gubernur no. 135 tahun 2009 berubah menjadi UPT (Unit Pelayanan Teknis) Taman Margasatwa Ragunan, dan kembali berubah namanya pada tahun 2010 menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Taman Margasatwa Ragunan.

Pada tahun 1999 mulai dibangun fasilitas baru yaitu berupa wahana Pusat Primata Schmutzer (PPS) yang merupakan kegiatan kerjasama dan dibiayai oleh penyandang dana (donator) dari pemerhati lingkungan (pihak Schmutzer) yang kemudian diresmikan tanggal 22 agustus tahun 2002 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Pusat primata ini kemudian menjadi salah satu pusat primata terbesar di dunia saat ini, serta kini dilengkapi dengan berbagai koleksi primata khususnya dari spesies Indonesia.

Gambar 4.1

Pusat Primata Schmutzer



4.2 Fungsi Taman Margasatwa Ragunan

- Konservasi

Konservasi juga berarti pelestarian alam baik fauna maupun flora. Fauna yang ada di Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari kelas mamalia 82 jenis, kelas aves 136 jenis, kelas reptilian 41 jenis dan kelas pisces 19 jenis. Jumlah keseluruhan jenis satwa ada 240 spesies dengan jumlah koleksi lebih dari 3500 ekor satwa (spesimen). Beberapa contoh satwa endemic dan langka yang berhasil dikembangkan di Taman Margasatwa Ragunan antara lain : orangutan, owa jawa, komodo, harimau sumatera, gajah, babirusa, dan lain-lain. Berikut gambar beberapa faunan yang ada di Taman Margasatwa Ragunan:

Gambar 4.2

Fauna di Taman Margasatwa Ragunan



Flora yang ada di Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari 171 jenis tumbuhan dari seluruh tanah air yang langka dengan jumlah mencapai 15.389 pohon (spesimen). Fungsi flora adalah tidak lain sebagai paru-paru kota karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan mereduksi gas-gas karbon dari proses pembakaran dan aktifitas lainnya. Selain itu tanaman/hutan kota di areal Taman Margasatwa Ragunan mampu mengefektifkan proses peresapan air tanah sebagai cadangan air untuk kebutuhan hidup manusia.

Gambar 4.3
Flora di Taman Margasatwa Ragunan



- Edukasi

Pendidikan konservasi merupakan salah satu cara memberikan wawasan kepada generasi penerus agar mempunyai kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang mencakup flora dan fauna. Taman Margasatwa Ragunan memberikan pelayanan pemandu wisata, pemutaran film dokumenter tentang satwa, tersedianya perpustakaan, serta event pendidikan lain dengan suasana yang dikemas dalam nuansa alam.

- Penelitian

Sebagai salah satu kebun binatang yang terbesar di Indonesia, Taman Margasatwa Ragunan juga menjadi salah satu pusat penelitian satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Para peneliti, pelajar, mahasiswa baik dari dalam dan luar negeri melakukan observasi tentang perilaku satwa, reproduksi, pakan dan sebagainya sebagai bahan untuk kajian ilmiah.

- Rekreasi Alam

Taman Margasatwa Ragunan merupakan tempat wisata yang bernuansa alam menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena selain udara yang masih bersih dengan rimbunnya pohon yang ada, sekaligus juga dapat menikmati keelokan satwa yang ada. Rekreasi alam dilengkapi dengan

sarana rekreasi yang dapat dinikmati pengunjung seperti kereta keliling, rakit wisata, permainan anak, gajah tunggang, onta tunggang, kuda tunggang, foto bersama satwa, dan rekreasi lainnya.

4.3 Letak Geografis Taman Margasatwa Ragunan

Taman Margasatwa Ragunan terletak di jalan Harsono RM No. 1 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sekitar 20 km dari pusat kota Jakarta. Taman Margasatwa Ragunan berdiri di atas tanah latosol yang berada di ketinggian 50 m di atas permukaan laut dengan curah hujan berkisar 2300 mm, luas area Taman Margasatwa Ragunan Sebesar \pm 147 ha.

Gambar 4.4

Peta Lokasi Taman Margasatwa Ragunan



4.4 Organisasi Taman Margasatwa Ragunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 141 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Provinsi DKI Jakarta maka terbentuklah peraturan daerah No. 3 Tahun 2001 pasal 154 tentang tugas pokok, fungsi dan struktur Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Taman Margasatwa Ragunan adalah sebuah organisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta. Ketika berubah menjadi UPT ataupun BLUD, struktur organisasi dari pengelola taman margasatwa ragunan mengacu dari peraturan gubernur no. 135 tahun 2009. BLUD Taman Margasatwa Ragunan telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur No. 323/2010 tanggal 23 februari 2010.

UPT Taman Margasatwa Ragunan juga memiliki Visi dan Misi, yaitu:

Visi: Terwujudnya TMR provinsi DKI Jakarta yang sejajar dengan kebun binatang di kota-kota besar di negara maju yang dihuni oleh satwa-satwa yang sejahtera.

- Misi:
- Meningkatkan kualitas kesejahteraan satwa mendekati habitatnya.
 - Meningkatkan profesionalisme SDM.
 - Meningkatkan cinta satwa kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi konservasi ek-situ.
 - Meningkatkan kerjasama ilmiah dan informasi satwa baik dalam dan luar negeri.
 - Meningkatkan hubungan antar daerah dan negara melalui program tukar menukar satwa antar kebun binatang dalam dan luar negeri.
 - Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengunjung.
 - Meningkatkan pendidikan lingkungan.

Selain itu UPT Taman Margasatwa Ragunan juga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : sesuai peraturan gubernur no. 135 tahun 2009 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan, maka unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan.

Fungsi, untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan mempunyai Fungsi:

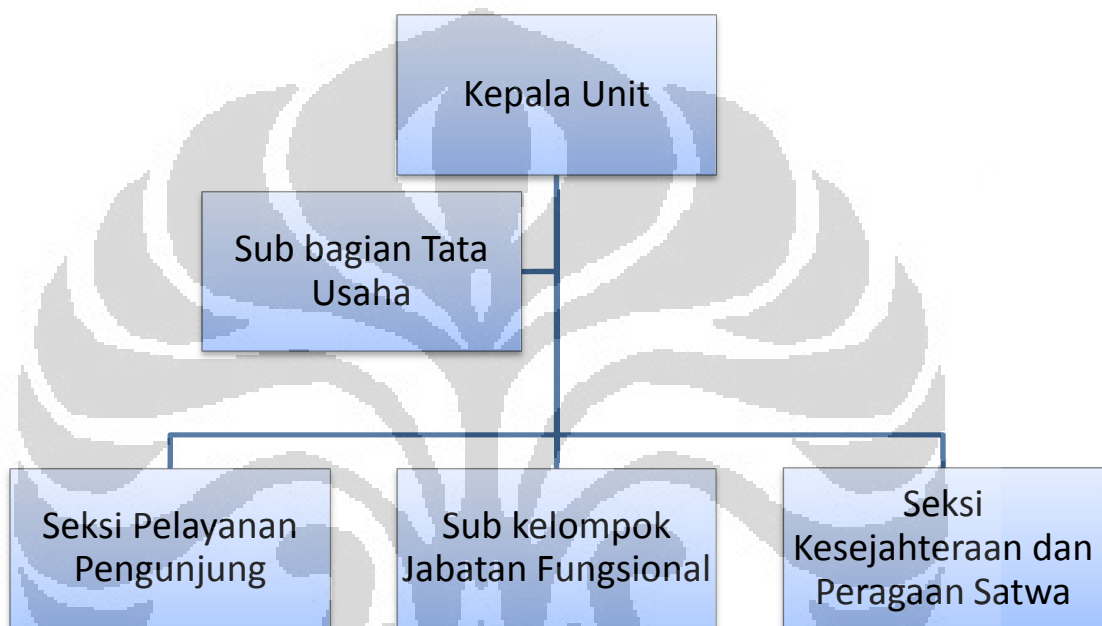
- Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) unit pengelola.
- Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) unit pengelola.
- Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan khusus dalam kawasan Taman Margasatwa Ragunan.
- Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan keanekaragaman satwa dan flora.
- Pengelolaan kegiatan rekreasi di Taman Margasatwa Ragunan.
- Penyelenggaraan promosi dan pameran fauna dan habitatnya.
- Pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Taman Margasatwa Ragunan.
- Pelaksanaan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit kerja perangkat daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pengembangan Taman Margasatwa Ragunan.
- Penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenal satwa, fauna, flora dan habitat.
- Pelaksanaan publikasi kegiatan unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

- Penelitian dan pendidikan lingkungan yang berkenaan dengan satwa/fauna, flora, habitat, dan konservasi.
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.
- Pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan ketatausahaan
- Pelaksanaan upacara dan peraturan acara unit pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan
- Penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelola.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelola.

Unit pengelola Taman Margasatwa Ragunan menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dan juga sekaligus menjaga dan memelihara segala aspek yang ada dalam Taman Margasatwa Ragunan, termasuk dalam hal menjaga lingkungan dan juga satwa di dalamnya. Dengan ada unit pengelola ini, diharapkan Taman Margasatwa Ragunan dapat beroperasi dan mengembangkan taman menjadi lebih baik, dan bias mengatasi segala tantangan dalam perkembangan jaman. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka susunan organisasi di Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari :

1. Kepala Unit
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pelayanan Pengunjung
4. Seksi Kesejahteraan dan Peragaan Satwa
5. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Pengelola Taman Margasatwa Ragunan



Sumber: Peraturan Gubernur no. 135 tahun 2009

4.5 Tarif Retribusi Taman Margasatwa Ragunan

Pengenaan tarif yang diberlakukan pengelola Taman Margasatwa Ragunan diambil dari peraturan daerah provinsi DKI Jakarta no. 1 tahun 2006 mengenai retribusi daerah, tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan.
 1. Dewasa Rp 4.000,00/orang
 2. Anak-anak (3-12 tahun) Rp 3.000,00/orang
 3. Rombongan pelajar/mahasiswa/panti social paling sedikit 30 orang dikenakan tarif 75% dari tarif yang berlaku
 4. Juru foto Rp 10.000,00/orang
- b. Pemakaian fasilitas Taman Margasatwa Ragunan.

1. Pemakaian tempat penitipan kendaraan:
 - a) Mobil Rp 5.000,00/hari
 - b) Bus/truk Rp 10.000,00/hari
 - c) Sepeda motor Rp 2.500/hari
 - d) Sepeda Rp 1.000/hari
2. Pemakaian sarana/prasarana Taman Margasatwa Ragunan:
 - a) Kuda tunggang Rp 3.000,00/orang
 - b) Unta tunggang Rp 5.000,00/orang
 - c) Gajah tunggang Rp 6.000,00/orang
 - d) Taman satwa anak-anak/pentas Rp 1.500,00/hari
- c. Pemakaian kawasan pusat primata untuk menyaksikan gorilla dan primata:
 1. Hari biasa
 - a) Dewasa Rp 5.000,00/orang
 - b) Anak-anak Rp 5.000,00/orang
 2. Hari minggu/besar
 - a) Dewasa Rp 5.000,00/orang
 - b) Anak-anak Rp 5.000,00/orang
 3. Rombongan pelajar/mahasiswa/panti social paling sedikit 30 orang dikenakan tarif 75% dari tarif yang berlaku
- d. Panggung Rp 150.000,00/hari
- e. Gedung informasi Rp 200.000,00/hari
- f. Gedung auditorium Rp 500.000,00/hari
- g. Sound sistem Rp 100.000,00/hari
- h. Pemutaran film satwa Rp 100.000,00/judul
- i. Penyediaan satwa untuk berfoto Rp 2.500,00/foto
- j. Pemakaian lokasi tempat:
 1. Untuk berdagang:
 - a) Hari minggu/besar Rp 15.000,00/hari
 - b) Hari biasa Rp 10.000,00/hari
 2. Untuk shooting:
 - c) Film cerita Rp 1.000.000,00/hari

d) Film iklan	Rp 1.500.000,00/hari
e) Film video dokumentasi	Rp 500.000,00/hari
f) Film video keluarga	Rp 250.000,00/hari

Dari hasil pengamatan langsung peneliti ditemukan beberapa tarif yang diberlakukan, namun tidak tertera di dalam perda no. 1 tahun 2006 tersebut, antara lain dikenakannya biaya premi asuransi sebesar Rp 500,00/orang, dimana asuransi tersebut dikelola oleh PT Asuransi Bangun Askrida. Nilai pertanggungan dari asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

- Meninggal dunia Rp 16.000.000,-
- Cacat tetap (maksimum) Rp 10.000.000,-
- Biaya perawatan (maksimum) Rp 1.000.000,-

Ada pula tarif yang dikenakan untuk peminjaman sepeda, yaitu sebesar:

- Ukuran kecil-sedang Rp 7.500,-/jam
- Ukuran besar Rp 10.000,-/jam
- Sepeda ganda Rp 15.000,-/jam

BAB 5

ANALISIS

Dalam bab lima ini, peneliti akan membahas mengenai hasil dari apa saja yang telah ditemukan dari hasil turun lapangan dalam kaitannya dengan efektifitas tarif retribusi taman margasatwa ragunan, dimana pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis upaya retribusi (*charge effort*), efektifitas (*Effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), dan penetapan harga (*pricing*) sesuai dengan apa yang ada dalam operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis yang dilakukan oleh peneliti diperoleh melalui proses wawancara mendalam, studi data, dan juga observasi di lapangan, berikut merupakan hasil analisis dari peneliti.

5.1 Upaya Retribusi (*charge effort*)

Hal yang pertama dalam membahas mengenai seberapa efektif tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah berkaitan dengan perundang-undangan, yang tidak lain mengacu dengan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat maupun peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah DKI Jakarta. Undang-undang terbaru mengenai retribusi daerah ada pada undang-undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana undang-undang tersebut merupakan pengganti dan sekaligus perbaikan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang no. 34 tahun 2000. Perubahan yang ada dalam undang-undang no.28 tahun 2009 ini antara lain adalah penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah, pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah, peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam undang-undang no.28 2009 yaitu menetapkan sistem tertutup atau *closed list*, artinya, pemerintah daerah (pemda) tidak bisa menambahkan jenis pajak dan retribusi baru, hal tersebut ditujukan untuk mengurangi adanya perda-perda bermasalah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, jadi pemerintah pusat lebih

menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya bisa menerapkan pajak dan retribusi daerah sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat juga ingin lebih mempertegas akan pengawasan dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, dimana dalam undang-undang yang baru pemerintah melakukan pengawasan preventif dan korektif, juga menerapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran. Pemerintah pusat terlihat lebih tegas dalam undang-undang no.28 tahun 2009 ini, namun juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah diskresi penetapan tarif. Mengenai undang-undang no.28 tahun 2009 ini sedikit dijelaskan oleh salah satu Informan, yaitu Dian Putra yang merupakan salah satu pejabat di Kementerian Keuangan:

“begini, jadi UU no. 28 tahun 2009 ini hanyalah sebagai guidance atau petunjuk bagi para pemerintah di daerah untuk membuat peraturan tentang pajak daerah maupun retribusi daerah, selebihnya diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, untuk yang ragunan ini, pemda DKI yang membuat peraturan itu sendiri dengan tarif yang sebesar itu, kita pemerintah pusat tidak membatasi tarif yang akan diberlakukan khususnya tentang retribusi jasa usaha, kita memberikan kebebasan kepada pemerintah di daerah... ..undang-undang no. 28 tahun 2009 ini dibentuk sebetulnya untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya pendapatan asli daerah, salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan diskresi kepada pemerintah daerah dimana mereka dapat dengan leluasa untuk menentukan tarif, jadi harusnya semua jenis retribusi itu diberikan diskresi sesuai dengan prinsip dan sarasannya dari diberlakukan tarif tersebut, kalau sarasannya adalah jasa usaha, maka dibenarkan daerah untuk mengambil keuntungan yang sebesar-sebesarnya, ini adalah kondisi ideal untuk seluruh kabupaten dan kota” (Wawancara dengan Dian Putra, 29 Mei 2011)

Dengan demikian maka terlihat bahwa undang-undang no. 28 tahun 2009 memang merupakan sebuah solusi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja keuangan dari pemerintah daerah dengan memberikan keleluasaan dalam menerapkan tarif, khususnya dari retribusi, walaupun demikian undang-undang tersebut juga tetap mengatur tentang pengawasan dari pusat kepada daerah, sehingga dengan demikian dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan juga control dari pemerintah pusat. Dalam undang-undang no.28 tahun 2009 dituliskan mengenai keleluasaan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif, khususnya mengenai retribusi jasa usaha, dimana ditulis dalam pasal 153 sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(undang-undang no.28 tahun 2009)

Dari pasal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk mengambil keuntungan dari retribusi, namun retribusi yang bersangkutan merupakan bagian dari retribusi jasa usaha, dimana pengelolaannya dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi Taman Margasatwa Ragunan dapat digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dimana merupakan kombinasi dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan juga retribusi tempat rekreasi, dengan kata lain Retribusi yang dikenakan dari Taman Margasatwa Ragunan dapat memperoleh keuntungan yang layak, seperti apa yang sudah dipaparkan dalam undang-undang no.28 tahun 2009. Mengenai hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu Informan yang merupakan salah satu pejabat di Badan Pengelola Keuangan Daerah provinsi DKI Jakarta, yaitu Pramudji:

“yaa retribusi ragunan ini kan retribusi... retribusi ini kan ada tiga, retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, dalam retribusi

jasa usaha kan ada retribusi pemakaian kekayaan daerah, nah itu kan merupakan tanah yang begitu luas itu kan merupakan kekayaan daerah dan didalamnya ada asset, sarana-sarana, kandang dan lainnya itu merupakan kekayaan daerah, jadi kena lah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Dalam undang-undang juga ada retribusi rekreasi, untuk sarana olahraga dan rekreasi, jadi pemda DKI atau pemerintah daerah di seluruh indonesia diperkenankan memberikan jasa layanan tempat rekreasi, dengan peranan biaya...” (Wawancara dengan Pramudji, 29 mei 2011)

Dengan berlandaskan undang-undang no.28 tahun 2009 tersebut setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia dapat mengenakan tarif retribusi jasa usaha dengan nominal yang dapat menguntungkan guna meningkatkan pendapatan melalui sektor retribusi, namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta menunjukkan bahwa mereka menerapkan tarif terhadap salah satu sektor retribusi jasa usahanya, yaitu retribusi Taman Margasatwa Ragunan. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi daerah, peraturan daerah tersebut memang sudah ada terlebih dahulu daripada undang-undang no. 28 tahun 2009 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, jadi perubahan dari undang-undang tersebut tidak tercermin pada peraturan daerah pemerintah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2006 tentang retribusi. Dalam peraturan daerah pemerintah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2006 ini merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang seluruh retribusi daerah yang dikenakan oleh pemerintah DKI Jakarta, walaupun undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sudah disahkan, namun perda no.1 tahun 2006 tetap digunakan, dan belum ada perubahan dalam perda tersebut, karena isi yang ada didalamnya masih sejalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang no. 28 tahun 2009. Mengenai hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu informan yang merupakan pejabat UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan, yaitu Bambang:

“...perda DKI tentang retribusi itu kan lebih tua daripada undang-undang retribusi, jadi yaa hal-hal baru dalam undang-undang tidak tercantum dalam perda DKI, perdanya itu no.1 tahun 2006, apabila ada yang tidak sesuai harus segera direvisi, namun tidak ada hal yang bertentangan secara mencolok antara perda dan undang-undang, jadi perda no.1 tahun 2006 masih ditearapkan sampai sekarang Untuk perdanya itu sendiri kalau ingin membahas tentang retribusi TMR itu hanya merupakan bagian dari perda tersebut, maksud saya disini perda itu isinya mengatur akan berbagai macam jenis retribusi yang dijalankan pemda DKI, tidak hanya tentang TMR saja.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Peraturan daerah no. 1 tahun 2006 kota Jakarta ini memang tidak fokus pada satu jenis retribusi saja, namun secara keseluruhan retribusi yang diterapkan dibahas dalam satu peraturan dan dimuat dalam peraturan daerah dengan jumlah halaman sebanyak 238 halaman, merupakan hal yang berbeda dibanding dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah lainnya. Hal tersebut baik karena semua terangkum menjadi satu peraturan, sehingga tidak perlu membuat banyak peraturan lagi mengenai retribusi, namun dilain pihak juga menimbulkan kesulitan tersendiri apabila ingin merevisi peraturan tersebut, karena perubahan pada satu jenis retribusi saja dalam peraturan tersebut harus merevisi secara keseluruhan peraturannya, itu bisa jadi menghambat apabila ada salah satu jenis retribusi yang ingin segera direvisi, namun harus menunggu revisi lainnya terlebih dahulu. Salah satu informan Bambang juga berpendapat akan hal tersebut, seperti diungkapkannya:

“...peraturan sudah ada dan tertera dengan jelas bagaimana objek, subjek, tarif dan kami disini tinggal melaksanakan peraturan yang sudah ada tersebut, pemda DKI juga pasti punya alasan tersendiri untuk menggabungkan semua jenis retribusi dalam satu perda saja, itu kan bisa lebih efektif dan efisien dalam pengesahannya, tidak perlu melakukan beberapa sidang pengesahan. Namun ada juga kelemahannya juga kalau menurut saya, karena ketika pemda ingin melakukan revisi akan satu jenis retribusi, mau tidak mau juga harus melakukan revisi untuk yang jenis

lain, dan hal tersebut bisa jadi menghambat dalam melakukan revisi perda.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Dalam peraturan daerah no. 1 tahun 2006 provinsi DKI Jakarta dituliskan beberapa hal sebagai berikut:

- Jenis pelayanan dan kewajiban
- Objek, golongan, nama, dan subjek
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
- Prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif

Semua hal tersebut dipaparkan dengan rinci dan jelas, sehingga pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan dapat mengacu dari perda tersebut dalam menjalankan kegiatan untuk melakukan kegiatan memungut retribusi. Jika dikaitkan dengan undang-undang no. 28 tahun 2009 juga tidak ada hal yang bertentangan, karena pelaksanaan retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah bagian dari retribusi tempat rekreasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga tidak harus direvisi karena jenis retribusi itu terdapat dalam undang-undang tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga memaparkan prinsip dan sasaran penetapan tarif dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang tercantum dalam pasal 98 sebagai berikut:

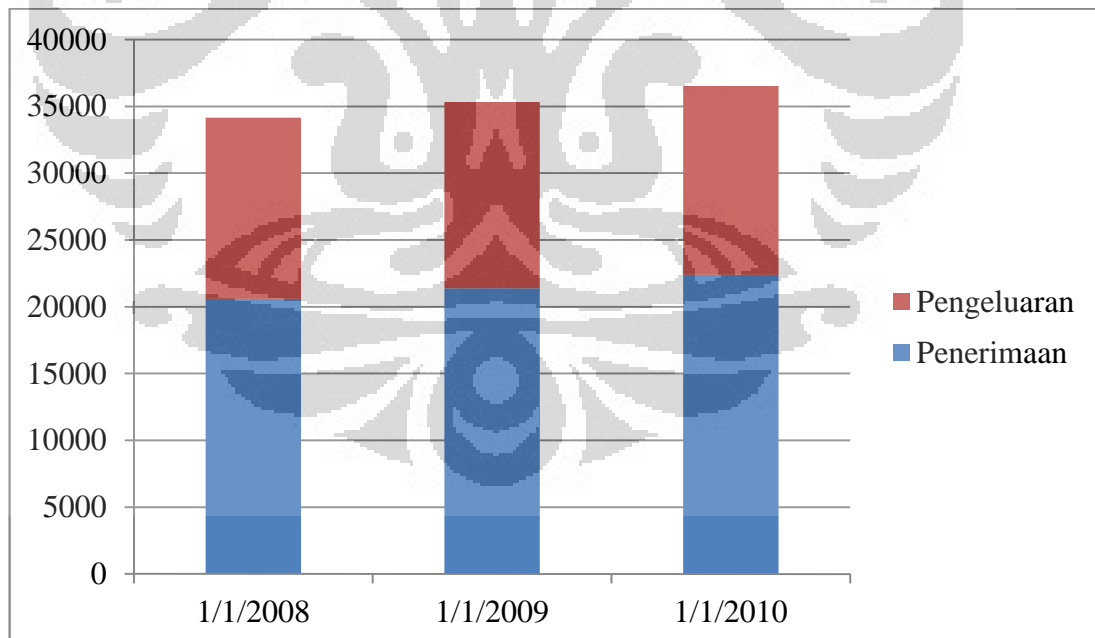
“Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi serta fasilitas/sarana Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.” (Perda no.1 tahun 2006 provinsi DKI Jakarta)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemprov DKI Jakarta dalam menetapkan tarif memperhatikan biaya-biaya yang dibutuhkan pihak pengelola dan juga membenarkan dalam memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi harga pasar. Dalam pasal berikutnya kemudian dipaparkan dengan sangat rinci

seberapa besar tarif yang diberlakukan untuk retribusi di Taman Margasatwa Ragunan, sehingga pengelola dapat menerapkan tarif tersebut dalam prakteknya di lapangan, nominal tarif tersebut seharusnya sesuai dengan prinsip penetapan tarif. Kenyataannya adalah pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif retribusi yang rendah untuk Taman Margasatwa Ragunan, sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan oleh pengelola tidak dapat ditutupi sepenuhnya oleh hasil retribusi, dan pada akhirnya pemprov DKI harus memberikan subsidi kepada pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Tidak dapat terpenuhinya biaya-biaya yang dibutuhkan dapat dilihat dari hasil penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir selalu lebih rendah daripada pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan, hal tersebut dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Gambar 5.1

Grafik Pendapatan dan Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan tahun 2008-2010 (dalam 1,000,000 Rupiah)



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah provinsi DKI Jakarta

Apabila melihat dari grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah pengeluaran yang dilakukan selalu lebih besar dalam kurun waktu tiga tahun

terakhir, walaupun pendapatan dapat dikatakan selalu meningkat setiap tahunnya, namun jumlah pengeluaran juga ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan apabila adanya kelemahan dalam peraturan daerah no. 1 tahun 2006 provinsi DKI Jakarta khususnya yang berkaitan dengan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana tarif yang ditetapkan terbukti dalam prakteknya tidak sesuai dengan prinsip yang telah dituliskan, yaitu memperhatikan biaya dan juga memperoleh keuntungan yang layak. Walaupun demikian kejelasan akan isi dari perda tersebut dapat dikatakan baik, karena menjelaskan dan mengatur tentang retribusi Taman Margasatwa Ragunan dengan lugas.

Masih dalam kaitannya dengan upaya retribusi (*charge effort*) dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang menjadi salah satu ujung tombak dari efektif atau tidaknya retribusi yang dijalankan adalah mengenai organisasi yang mengelola kegiatan retribusi tersebut, dalam hal ini tidak lain yang berperan sebagai pengelola adalah UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan. Organisasi tersebut adalah unit kerja dari Dinas Kelautan dan Pertanian provinsi DKI Jakarta, dimana bukan sepenuhnya Badan Layanan Umum Daerah, namun menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perubahan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 323/2010 yang disahkan pada tanggal 23 februari 2010. Mengenai hal tersebut dijelaskan oleh salah satu Informan Pramudji, sebagai berikut:

“iya itu baru tahun lalu, 2010 dimana yang dirubah itu baru pengelolaan keuangannya saja yang menerapkan sistem seperti yang digunakan oleh BLUD lainnya, tapi mereka masih UPT dari dinas kelautan dan pertanian pemerintah DKI.” (Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Informan lainnya juga menambahkan informasi mengenai organisasi pengelola Taman Margasatwa Ragunan, dijelaskan oleh Bambang, sebagai berikut:

“ada yang harus diluruskan yaa mas, kita ini sebenarnya bukan sepenuhnya Badan Layanan Umum, kita masih Unit Pelayanan Teknis dibawah Dinas Kelautan dan Pertanian pemprov DKI, namun sesuai keputusan Gubernur Nomor 323/2010 23 Februari 2010, dimana dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa BLUD Taman Margasatwa Ragunan

ini ditetapkan sebagai UPT khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK-BLUD, nah dengan itu kami setiap tahunnya akan membuat yang namanya RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran akan dimasukkan kedalam sistem perencanaan APBD dan juga sistem informasi pengelola keuangan daerah.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Perubahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja dan juga merupakan alat untuk mengendalikan organisasi yang melaksanakan kegiatan dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dengan menggunakan apa yang biasa dilakukan oleh Badan Layanan Umum atau bahkan diterapkan oleh sektor swasta yaitu dengan menerapkan Rencana Bisnis Anggaran. RBA tersebut merupakan sebuah rangkaian dalam memproyeksikan penerimaan dan juga pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan, dengan demikian pengelola dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang akan dianggarkan, dan kemudian akan disampaikan dalam sistem APBD dan sistem pengelola keuangan daerah provinsi DKI Jakarta. Setidaknya dengan perubahan tersebut dapat meminimalkan adanya kendala dalam pengelolaan keuangan di Taman Margasatwa Ragunan, namun tidak sepenuhnya lepas dari serangkaian masalah dan juga kendala yang terkait dengan pelaksanaan retribusi, antara lain seperti yang diungkapkan oleh salah satu Informan Bambang, sebagai berikut:

“kendala yang ada banyak yaa, bisa yang disebabkan faktor alam dan juga faktor manusia, misalnya pada tahun 2006 yang lalu kan sempat tersebar isu mengenai flu burung yang sangat berpengaruh bagi setiap pengelola taman margasatwa di belahan dunia manapun, tidak terkecuali di ragunan ini, kami jadi harus memberikan perhatian ekstra pada satwa supaya mereka tidak terjangkit penyakit itu, dan imbasnya juga kunjungan ke ragunan menjadi sangat sepi, dan membuat kita rugi, namun itu sudah berangsur pulih dan sekarang sudah bisa menjadi berjalan seperti sedia kalanya, dan untuk tetap menjaga kondisi tersebut kami juga selalu

menganggarkan dana untuk mencegah virus flu burung itu merebak di disini, kita juga mendatangkan para ahli untuk mengatasi masalah tersebut. Ada juga masalah yang datangnya dari manusia itu sendiri, misalnya ada saja orang yang suka berbuat jail dengan merusak fasilitas, membuang sampah sembarangan, memberi satwa makanan yang tidak jelas, tapi kami mencegah hal tersebut dengan membuat peraturan untuk pengunjung dan juga membuat rambu-rambu untuk memperingati, dan juga menyiapkan petugas yang siaga mengawasi pengunjung, namun yaa masih tetap saja ada yang luput, namun sebisa mungkin kami minimalkan...” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan paling tidak sudah dapat meminimalkan serangkaian masalah dan kendala, sehingga pelaksanaan kegiatan retribusi secara umum dapat berjalan dengan semestinya, namun selain masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi, masih ada beberapa masalah diluar itu yang tidak begitu berpengaruh terhadap kegiatan retribusi, sesuai pengamatan secara langsung oleh peneliti antara adalah masalah lingkungan seperti sampah, tempat-tempat yang kotor, kondisi hewan, infrastruktur yang sudah rusak, walaupun hal-hal tersebut tidak begitu mempengaruhi akan kegiatan retribusi, namun berpengaruh dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola, jadi ada baiknya pengelola UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan peduli akan hal tersebut.

5.2 Efektifitas (*Effectiveness*)

Indikator yang kedua dalam membahas tingkat efektifitas dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah hal yang berkaitan dengan hasil guna, dimana hasil guna ini berkaitan dengan tahapan dalam administrasi penerimaan dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan itu diperoleh. Beberapa hal yang harus dicermati mengenai administrasi penerimaan adalah mulai dari penetapan tarif, pelaksanaan sistem pemungutan, pembukuan dari hasil penerimaan retribusi, dan juga dalam perhitungan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan retribusi.

Penjelasan mengenai penetapan tarif akan diuraikan secara rinci pada sub-bab selanjutnya, maka dari itu mengenai penetapan tarif dilewati terlebih dahulu, dan langsung membahas mengenai pelaksanaa dari sistem pemungutan retribusi Taman Marga Satwa Ragunan. Sistem pemungutan retribusi ini dilakukan dengan menerapkan pembelian tiket sebagai tanda bukti pembayaran dan setelah itu baru bisa menikmati pelayanan yang disediakan, misalnya adalah pembelian tiket masuk, dimana pengunjung bisa memasuki area Taman Margasatwa Ragunan apabila memiliki tanda bukti pembayaran tiket masuk itu. Sistem tersebut juga berlaku dengan pengenaan retribusi penggunaan fasilitas seperti jasa foto satwa, gajah tunggang, sewa panggung dan lainnya. Salah satu informan Bambang juga menjelaskan tentang sistem pelaksanaan retribusi, sebagai berikut:

“...sistemnya itu mudah saja, mas tri kan juga pasti mengalami sebelumnya, jadi prosedurnya pengunjung datang ke loket membeli tiket sebagai tanda bukti retribusi dengan tarif yang sudah ditetapkan, mereka mendapatkan tiket lalu ada pemeriksaan tiket oleh petugas, barulah setelah itu mereka bisa masuk ke area taman margasatwa ragunan, tapi jangan lupa di dalam area ragunan juga ada pengenaan beberapa retribusi seperti kuda tunggang, foto satwa, smutzer, sewa tempat, dan yang semua tertera dalam perda lah, itu semua kami jalankan dan melakukan pemungutan...” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

GAMBAR 5.2

Bukti pembayaran tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan

DEWASA		1	@ Rp.	/Orang	Rp.	4.000
ANAK-ANAK		0	@ Rp.	/Orang	Rp.	0
DISKON ROMBONGAN *		25%			Rp.	0
(Minimal 30 orang)					Rp.	0
KENDARAAN			TOTAL		Rp.	4.000

UNTUK 1X MASUK
 No. I .10 091428 * (Khusus Pelajar, Mahasiswa, Panti Sosial)

9:11:37:01

Gambar adalah tanda pembayaran retribusi dari tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan, di tanda bukti tersebut terlihat dengan jelas jumlah biaya yang harus dibayarkan dan juga memperlihatkan sumber atau acuan pengenaan tarif dari tiket masuk Ragunan, walaupun terkesan tidak penting namun hal tersebut merupakan bukti legal akan pengenaan tarif tersebut, sehingga tidak ada penarikan biaya secara liar yang dilakukan oleh pengelola. Pada hari biasa tentu kegiatan penarikan retribusi ini terlihat mudah dan tidak sulit untuk dilakukan, namun ada saatnya kegiatan penarikan retribusi menjadi lebih rumit, antara lain adalah disaat musim liburan dimana pengunjung yang datang meningkat tajam ketimbang dengan hari biasa, permasalahan tersebut diakui oleh salah satu Informan Bambang dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“...ada juga keadaan disaat pengunjung yang sangat banyak membanjiri kebun binatang, itu kan sebenarnya hal yang menguntungkan, namun juga bisa menjadi masalah apabila kita tidak siap menghadapinya, dengan jumlah pengunjung yang sangat banyak, perilaku mereka sulit di kontrol, hal itu kami coba antisipasi dengan merekrut tambahan pekerja yang khusus dipekerjakan disaat musim liburan, dan dana untuk membiayai hal tersebut sudah disiapkan disetiap tahunnya dalam anggaran.”

(Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan pada saat musim liburan memang melonjak tajam dibanding dengan hari biasa, puncaknya bisa mencapai 90 ribu lebih pengunjung dalam satu harinya, namun pihak pengelola juga sudah mempersiapkan hal tersebut dengan menambah jumlah pekerja yang khusus dipekerjakan disaat liburan, misalnya pekerja kebersihan dan keamanan yang dibantu oleh pihak kepolisian. Langkah-langkah pencegahan tersebut tidak lantas sepenuhnya menghapuskan semua permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan *ticketing* pada musim liburan sering dilanda masalah, salah satu Informan yang merupakan pengunjung, Heri mengungkapkan:

“...apalagi kalo lagi musim liburan, wah itu parah banget mas antrian untuk tiketnya kacau! ...” (Wawancara dengan Heri, 5 Juni 2011)

GAMBAR 5.3

Kepadatan di loket Taman Margasatwa Ragunan



Gambar diatas menunjukkan begitu padatnya antrian orang yang ingin membeli tiket untuk masuk Taman Margasatwa Ragunan, antrian sangat tidak beraturan sehingga menimbulkan saring desak antar pengunjung, hal tersebut dapat menjadi catatan tersendiri bagi pengelola TMR untuk meningkatkan pelayanannya tidak hanya pada hari biasa, namun juga harus siap dengan lonjakan pengunjung pada musim liburan.

Proses yang dilakukan setelah dilakukan pungutan atas retribusi di Taman Margasatwa Ragunan adalah pembukuan, dimana dalam proses ini dilakukan pencatatan atas berapa uang yang telah diterima maupun dikeluarkan oleh pihak Taman Margasatwa Ragunan. Hal tersebut merupakan sebuah tahapan penting dalam sebuah retribusi, karena selain menerima hasil, pengelola juga harus mencatat dan untuk dilaporkan kepada pemerintah di atasnya dalam hal ini adalah pemerintah DKI Jakarta. Pencatatan yang dilakukan merupakan gambaran secara nominal dari apa yang telah dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan, sejauh mana hasil yang diperoleh dan seberapa besar pengeluaran yang dilakukan dapat dilihat dari hasil pembukuan dan pencatatan tersebut. Pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan itu sendiri memiliki bendahara penerimaan dan juga pengeluaran yang bertugas dalam membuat pencatatan dan pembukuan yang dilakukan setiap harinya, dan setelah itu diserahkan ke

pengelola keuangan daerah, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Informan Bambang, sebagai berikut:

“Setiap harinya kita melakukan pencatatan hasil dari retribusi yang dikelola bendahara penerimaan dan juga bendahara pengeluaran, kemudian uang hasil retribusi tersebut dikumpulkan dan langsung disetorkan ke bendahara umum daerah pemprov DKI, biasanya kita melakukan transfer melalui bank DKI, untuk laporan tertulisnya dilaporkan langsung ke bendahara umum daerah.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Dalam proses pembukuan dan pelaporan akan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, yang selanjutnya menerima dan mengelola keuangannya adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah provinsi DKI Jakarta, dimana badan tersebut bertugas mengelola sumber-sumber keuangan yang telah dijalankan unit-unit yang menjalankan kegiatan retribusi ataupun pendapatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Pelaporan atas pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh pengelola harus dilaporkan dalam waktu 1 kali 24 jam, hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan Pramudji, sebagai berikut:

“laporan keuangannya yaa ada dua, jadi ragunan itu SKPD ada dua bendahara yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan itu bertugas menerima uang dan menjaga penerimaan daerah untuk dilaporkan ke rekening kas umum daerah ... yaa itu dalam waktu 1 kali 24 jam, diterima jadi yaa besoknya segera dilaporkan, dalam 24 jam itu harus sudah diserahkan di bank induk keuangan daerah, yaa itu ada bank DKI, kebetulan pemda DKI menggunakan bank DKI dalam proses penyetoran keuangannya tersebut.” (Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Tahapan pembukuan dan pelaporan ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta kepada unit-unit

dibawahnya yang mengelola kegiatan retribusi, dengan mekanisme sistem pelaporan yang ada pemerintah daerah dapat melihat dan memantau keberlangsungan kegiatan retribusi tersebut melalui laporan keuangan yang telah dilaporkan. Dengan adanya sistem administrasi dalam pelaporan ini juga tentunya lebih memudahkan pemerintah untuk memperoleh laporan-laporan keuangan dari unit-unit pelaksana dibawahnya, hal tersebut dilakukan misalnya melalui pembuatan kode-kode rekening tertentu, misalnya Taman Margasatwa Ragunan memiliki kode rekening sekian, dan unit lain memiliki kode yang berbeda, dengan begitu pemerintah dapat mengetahui unit-unit mana saja yang telah mengirimkan laporan keuangannya dan juga yang belum, untuk hal ini salah satu informan Pramudju kembali menjelaskan:

“nah semua hasil itu kan terkait mekanisme sistim, melalui pengawasan dengan sistem administrasinya kan ada, nah itu berdasarkan peraturan gubernur no. 162 mengenai tata cara pelaksanaan retribusi daerah, yaudah jadi tinggal transfer ke bank atau bisa juga dikirim langsung ke kas daerah terdekat, jadi itu berdasarkan laporan tertulis dari bendahara penerimaan di ragunan lapor ke bendahara umum daerah BUD, nah BPKD itu selaku BUD, itu mengenai laporan pengelolaan keuangan ini ada peraturannya di permendagri 13 tahun 2006, jadi laporannya itu dilaporkan setiap hari, nanti disini kan kita ada perbendaharaan yang mengelola kas umum daerah, jadi dia tau ada kode rekeningnya, setoran darimana ragunan atau lainnya, jadi tau dia itu laporan darimana.”
(Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Dengan adanya sistem tersebut pemerintah DKI dapat meningkatkan performa keuangannya, karena dengan sistem yang ada dapat meminimalkan terjadinya kesalahan, walaupun seandainya terjadi kesalahan dapat dilakukan rekonsiliasi melalui mencocokkan antara laporan keuangan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta dengan laporan yang dibuat oleh unit-unit pelaksana dibawahnya. Hal tersebut juga disungguh oleh salah satu Informan Pramudji, sebagai berikut:

“...namanya human error itu pasti ada, apalagi angka yaa pasti ada saja salahnya, makanya di akuntansi kita mengenal rekonsiliasi untuk mencocokkan satu dengan yang lainnya. Yaa untuk pengawasan pengelolaan keuangan itu kan harus melewati mekanisme pelaksanaan APBD sesuai dengan pergub 130 tahun 2009, APBD ini kan setiap tahun diperiksa, begitu juga seperti APBN.” (Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Kejelasan dari alur dari pembukuan sampai pelaporan dari laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan sudah cukup jelas karena telah ada sebuah sistem yang tegas, mengenai bagaimana alur yang harus dilalui dan juga sudah diatur dalam peraturan yang tegas. Dengan kata lain pemerintah DKI Jakarta telah membuat sistem yang cukup efektif dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemungutan retribusi.

Untuk melanjutkan dalam menjelaskan sejauh mana efektifitas dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah melalui gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang telah direncanakan. Setiap tahunnya UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan membuat sebuah Rancangan Bisnis dan Anggaran, dimana dalam RBA tersebut ditetapkan atas proyeksi atau target penerimaan yang akan didapatkan oleh pengelola untuk tahun depan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk usaha dari Pemprov DKI dalam meningkatkan kinerja setiap unit pengelolanya. Untuk pendapatan dari Taman Margasatwa Ragunan itu sendiri setiap tahunnya berada dalam kisaran 20 miliar rupiah, sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu Informan Bambang sebagai berikut:

“untuk beberapa tahun terakhir ini perolehan dari hasil retribusi itu sekitar 20 miliar rupiah, untuk tahun lalu sebesar 22 miliar rupiah, untuk perhitungan setengah tahun ini pada bulan juni kemarin sudah dapat 11 miliar rupiah dan diperkirakan pada akhir tahun akan diperoleh 23 miliar lebih.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Kemudian salah satu Informan Pramudji juga menambahkan mengenai pendapatan dari Retribusi Taman Margasatwa Ragunan sebagai berikut:

“...yang dari ragunan itu hanya 15 sampai 20 miliar, jadi kecil sekali. Jadi retribusi ini sebetulnya hanya sebagai tolak ukur kinerja ... bisa dibilang selama ini target dan realisasi pendapatan dari ragunan sesuai dengan apa dilaporkan oleh pengelola disana sudah berjalan cukup baik, bahkan untuk tahun kemarin bisa melebihi target yang telah ditetapkan, berada dikisaran 102 persen dari apa yang ditargetkan, dan untuk tahun-tahun sebelumnya juga tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang sudah ditargetkan” (Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Pentingnya melihat korelasi antara target dan realisasi penerimaan adalah untuk meninjau sejauh mana UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan, apabila realisasi lebih rendah daripada target, maka dapat dikatakan pengelola tidak bisa memproyeksikan dan juga menjalankan kegiatan retribusi secara efektif. Dengan demikian harus dilihat seberapa besar penerimaan yang ditargetkan dan juga realisasi yang diperoleh oleh UPT BLUD Taman Margasatwa Ragunan dalam tiga tahun terakhir, berikut merupakan tabel dari realisasi anggaran secara umum yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan, sebagai berikut:

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Taman Margasatwa Ragunan tahun 2008-2010

Uraian	Anggaran	
	Plafon Setelah	Realisasi
PENDAPATAN Taman Margasatwa Ragunan		
Pendapatan Retribusi 2008	20,650,000,000	20,597,459,500
Pendapatan Retribusi 2009	21,250,000,000	21,375,842,500
Pendapatan Retribusi 2010	21,850,000,000	22,387,887,050

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan selama tiga tahun terakhir berada dalam kisaran 20 miliar rupiah, baik itu realisasi maupun target atau plafon setelah anggaran. Pemungutan dapat dikur dengan menggunakan Indeks Kinerja Retribusi atau disingkat IKR, yaitu dengan cara membagi realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan sebesar 20,597,459,500, sedangkan yang ditargetkan sebesar 20,650,000,000 maka IKR pada tahun 2008 sebesar:

$$\text{IKR} = \frac{20,597,459,500}{20,650,000,000} = \underline{0.997}$$

Sedangkan untuk tahun 2009 realisasi penerimaan sebesar 21,375,842,500 dengan target penerimaan sebesar 21,250,000,000, maka IKR tahun 2009 sebesar:

$$\text{IKR} = \frac{21,375,842,500}{21,250,000,000} = \underline{1.006}$$

Untuk tahun 2010 dengan realisasi penerimaan sebesar 22,387,887,050 dan juga, target penerimaan sebesar 21,850,000,000 maka IKR Taman Margasatwa Ragunan pada tahun 2010 adalah:

$$\text{IKR} = \frac{22,387,887,050}{21,850,000,000} = \underline{1.025}$$

Selama tiga tahun terakhir dapat dilihat terjadi peningkatan IKR dari hasil retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana pada tahun 2008 IKR sebesar 0.997 kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 1.006, dan kembali meningkat pada tahun 2010 sebesar 1.025. Walaupun sempat berada pada level nilai IKR dibawah satu poin yang berarti pengelola Taman Margasatwa Ragunan tidak bisa mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, namun dua tahun berikutnya mengalami peningkatan pendapatan sehingga nilai IKR berada diatas satu poin yang berarti pengelola Taman Margasatwa Ragunan berhasil mencapai target penerimaan dan melebihi target tersebut. Hasil itu menunjukkan adanya peningkatan pendapatan secara positif, dimana pengelola dapat dikatakan telah melaksanakan kegiatan untuk pemungutan retribusi Taman Margasatwa Ragunan secara umum melalui tinjauan penghitungan IKR. Untuk melihat secara detail

mengenai penerimaan yang diperoleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Taman Margasatwa Ragunan tahun 2010

No	Uraian Kode Rekening	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	
1	<u>Pemakaian Fasilitas/Sarana TMR</u>	<u>6,279,125,000</u>	-	<u>7,689,901,500</u>	-	<u>122.47</u>
	mobil	1,025,000,000	205,000	1,314,000,000	262,800	128.20
	bus/truck	85,000,000	8,500	120,670,000	12,067	141.96
	motor	1,366,795,000	546,718	1,641,922,500	655,769	120.13
	sepeda	2,500,000	2,500	11,223,000	11,223	448.92
	kuda tunggang	36,000,000	12,000	43,479,000	14,493	120.78
	unta tunggang	37,130,000	7,426	53,285,000	10,657	143.51
	gajah tunggang	175,000,000	35,000	283,615,000	56,723	162.07
	taman satwa anak/pentas	250,500,000	167,000	377,374,500	251,583	150.65
	pusat primata dewasa (libur)	1,640,000,000	328,000	1,793,360,000	358,672	109.35
	pusat primata anak (libur)	400,000,000	80,000	363,670,000	72,743	90.92
	pusat primata dewasa (biasa)	700,000,000	140,000	989,245,000	197,849	141.32
	pusat primata anak (biasa)	250,000,000	50,000	211,215,000	42,243	84.49
	panggung	12,000,000	80	29,250,000	195	243.75
	gedung informasi	7,600,000	38	11,000,000	55	144.74
	gedung auditorium	10,000,000	20	16,500,000	33	165.00
	sound system	5,000,000	50	10,100,000	101	202.00
	pemutaran film satwa	2,000,000	20	14,400,000	144	720.00
	penyediaan satwa jinak untuk berfoto	600,000	240	23,947,500	9,579	3991.25
	dagang hari libur	180,000,000	12,000	232,300,000	15,487	129.06
	dagang hari biasa	50,000,000	5,000	105,535,000	10,554	211.07
	film cerita	16,000,000	16	12,310,000	12	76.94
	film iklan	12,000,000	8	19,000,000	13	158.33
	film video dokumentasi	12,500,000	25	11,000,000	22	88.00
	film video keluarga	3,500,000	14	1,500,000	6	42.86
2	<u>Tempat Rekreasi TMR</u>	<u>14,070,875,000</u>		<u>13,354,651,000</u>		<u>94.91</u>
	dewasa	10,700,500,000	2,675,125	10,602,092,000	2,650,523	99.08
	anak	2,445,000,000	815,000	2,460,372,000	820,124	100.63
	rombongan dewasa	498,000,000	166,000	93,615,000	31,205	18.80
	rombongan anak	417,375,000	185,500	176,292,000	78,352	42.24
	juru foto	10,000,000	1,000	22,280,000	2,228	222.80
3	<u>Perjanjian Kerjasama TMR dengan Pihak Ke-3</u>	<u>1,500,000,000</u>		<u>1,343,334,550</u>	-	<u>89.56</u>
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	<i>21,850,000,000</i>		<i>22,387,887,050</i>		<i>102.46</i>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Dalam tabel mengenai pendapatan ragunan pada tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan Tempat Rekreasi TMR atau dari penjualan tiket masuk yaitu sebesar 13,354,651,000 rupiah, hampir dua kali lipat dari jumlah pendapatan lainnya. Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan salah satu Informan Bambang, sebagai berikut:

“penerimaan yang paling besar itu kan dari tiket masuk, walaupun dengan tarif yang sangat minim, untuk tahun lalu saja kami memperoleh 13 miliar dari pembelian tiket masuk atau lebih dari 1/2 dari total penerimaan keseluruhan yang sebesar 22 miliar...” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Walaupun demikian pendapatan yang sebesar 13,354,565,000 rupiah lebih itu masih dibawah target yang telah ditetapkan tahun sebelumnya yang sebesar 14,070,875,000 rupiah, hal tersebut terjadi karena proyeksi akan pendapatan dari hasil tiket rombongan jauh dibawah target. Sedangkan dari hasil pendapatan pemakaian fasilitas dan saran didapat hasil yang sangat baik dan melebihi dari apa yang sudah ditargetkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 6,279,125,000 rupiah dengan hasil yang diperoleh sebesar 7,689,901,500 rupiah, dengan margin antara target dan realisasi melebihi satu miliar rupiah tersebut dapat menutupi apa yang tidak sepenuhnya dicapai dari hasil penjualan tiket, dan pada akhirnya secara menyeluruh hasil realisasi lebih tinggi daripada apa yang sudah ditargetkan. Dengan jumlah pendapatan yang melebihi target tersebut, menunjukkan bahwa pengelola Taman Margasatwa Ragunan sudah secara efektif melaksanakan kegiatan retribusi, namun masih ada kelemahan dalam memproyeksikan dan juga memaksimalkan pendapatan dari beberapa pos pendapatan, seperti pendapatan dari hasil penjualan tiket yang masih kurang dari target, dan juga pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, itu bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi pengelola Taman Margasatwa Ragunan, untuk bisa meningkatkan kinerja pendapatan, dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan atau bahkan melebihi target.

5.3 Efisiensi (*efficiency*)

Indikator selanjutnya dalam membahas tingkat efektifitas dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah mengenai daya guna atau efisiensi, dimana dalam indikator ini berfokus pada pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Hal yang dicermati adalah antara lain mengenai seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan dalam menjalankan kegiatan retribusi dan apakah pengeluaran tersebut dapat ditutupi dari hasil penerimaannya.

Taman Margasatwa Ragunan memiliki kebutuhan yang tidak sedikit dalam mengelola kegiatan di dalamnya yang dilakukan oleh pengelola, sehingga dalam di dalam pengeluaran tersebut dibutuhkan subsidi dari pemerintah DKI Jakarta. Biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dibagi kedalam dua jenis kelompok pengeluaran yaitu pengeluaran yang bersubsidi dan non-subsidi, dimana dijelaskan oleh salah satu Informan Bambang sebagai berikut:

“...kita punya dua jenis anggaran untuk pengeluaran, yang pertama namanya anggaran non subsidi, kenapa disebut non-subsidi? Karena untuk pembiayaan ini kami mengambil dari perkiraan hasil dari penarikan subsidi di TMR ini, yang berarti tidak bisa lebih besar dari apa yang kami peroleh melalui hasil retribusi, pengeluaran apa yang dilakukan dalam pengeluaran non-subsidi antara lain seperti upan pegawai non-PNS, kegiatan atau pengadaan keperluan operasional kantor, dan hal lain yang lebih fokus akan kebutuhan kami sebagai penyelenggara kegiatan di TMR ini, karena jenis pengeluaran ini tidak lebih besar dari apa yang kami peroleh dari hasil yang di dapat dari retribusi, maka ada jenis pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran melalui anggaran yang disubsidi, antara lain untuk keperluan makan satwa, perbaikan kandang dan lainnya yang lebih fokus akan maintenance dari kebutuhan dari kebun binatang itu sendiri.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Selama tiga tahun terakhir pengelola Taman Margasatwa Ragunan mendapatkan subsidi dari pemerintah DKI Jakarta, karena pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola selalu lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan retribusi. Jika pendapatan berada dalam kisaran angka 20 miliar rupiah, pengeluaran berada dalam kisaran 30 miliar, secara umum pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja/Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan tahun 2008-2010

Uraian	Anggaran	
	Plafon Setelah	Realisasi
PENGELUARAN Taman Margasatwa Ragunan		
Belanja/Pengeluaran 2008	41,939,000,000	34,162,484,754
Belanja/Pengeluaran 2009	42,949,500,000	35,337,223,374
Belanja/Pengeluaran 2010	46,280,000,000	36,539,534,093

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Sama seperti pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi Taman Margasatwa Ragunan, setiap tahunnya jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola juga selalu mengalami peningkatan. Realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola dalam tiga tahun terakhir selalu lebih rendah dari besaran yang sudah dianggarkan, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola bisa menekan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan, sehingga setidaknya dapat menghemat anggaran dari pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan subsidi kepada pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Hal tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur kinerja pengelola dalam melakukan kegiatan secara efisien, sehingga bisa menghemat pengeluaran yang harus dilakukan. Hal tersebut juga dibahas oleh salah satu Informan Bambang sebagai berikut:

“...kami juga melakukan pengeluaran seminimal mungkin dan tidak melebihi apa yang kami anggarkan, hal itu guna menunjukkan kinerja kami yang bisa melakukan kegiatan yang efisien dan efektif, hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur kinerja kami yang dilihat oleh pemda DKI, nah selama ini untuk pengeluaran kebutuhan TMR tidak lebih dari apa yang sudah dianggarkan dan malah jauh lebih rendah, untuk tahun lalu saja kami menganggarkan untuk pengeluaran sebesar 46 miliar rupiah, tapi realisasi dari pengeluaran yang kami lakukan itu sebesar 36 miliar rupiah, itu membuktikan bahwa kami bisa menghemat uang pemda DKI sebesar 10 miliar rupiah dari apa yang kami lakukan.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Disamping keberhasilan dari pengelola dalam menekan pengeluarannya, namun tetap saja pengelola membutuhkan subsidi dari pemerintah DKI Jakarta untuk menutupi biaya-biaya yang dibutuhkan, karena jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh itu selalu lebih kecil dari pengeluaran yang diperlukan sehingga selalu terjadi defisit anggaran. Kebutuhan dari Taman Margasatwa tidaklah sedikit, baik dari kebutuhan dari pengelola sampai kebutuhan untuk merawat satwa dan juga lingkungan di dalamnya. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam tingkat efisiensi Taman Margasatwa Ragunan, karena apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluarannya maka dapat dikatakan tidak efisien. Untuk menghitung sejauh mana tingkat efisiensi dari suatu retribusi dapat menggunakan sebuah metode penghitungan yaitu Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP), dengan membandingkan antara hasil dari retribusi dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan retribusi tersebut, kemudian dikalikan 100%, semakin sebesar persentase yang diperoleh dari perhitungan tersebut berarti semakin besar tingkat efisiensi dari retribusi tersebut. Untuk melihat seberapa besar tingkat efisiensi dari retribusi Taman Margasatwa Ragunan dapat dilihat dari hasil REBP untuk 3 tahun terakhir, pertama untuk tahun 2008 dapat dilihat dalam realisasi anggaran Taman Margasatwa Ragunan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan 2008

Uraian	Anggaran		Penyerapan (%)
	Plafon Setelah	Realisasi	
PENDAPATAN			
Lain-lain PAD Yang sah			
Pendapatan Retribusi	20,650,000,000	20,597,459,500	99.75
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	20,650,000,000	20,597,459,500	99.75
BELANJA			
Belanja Langsung			
Belanja Pegawai	8,915,300,000	6,617,458,500	74.23
Belanja Bahan	12,070,700,000	10,940,475,150	90.64
Belanja Administrasi Umum	16,955,600,000	12,825,135,054	75.64
Belanja Modal	3,997,400,000	3,779,416,050	94.55
Jumlah Belanja Langsung	41,939,000,000	34,162,484,754	81.46
Surplus (defisit)		(13,565,025,254)	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan lebih besar daripada pendapatan, sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar 13,565,025,254 rupiah. Kemudian dalam perhitungan Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP), adalah sebagai berikut:

$$\text{REBP: } \frac{20,597,459,500}{34,162,484,754} \times 100\% = 60.29\%$$

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil REBP tahun 2008 sebesar 60.29% yang berarti jauh dari angka 100% yang merupakan patokan dasar dari tingkat efisiensi, karena apabila tidak mencapai angka 100%, maka kegiatan retribusi tersebut pada tahun 2008 tidak efisien. Kemudian untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi retribusi Taman Margasatwa Ragunan pada tahun 2009 dapat dilihat melalui tabel realisasi anggaran Taman Margasatwa Ragunan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan 2009

Uraian	Anggaran		Penyerapan (%)
	Plafon Setelah	Realisasi	
PENDAPATAN			
Lain-lain PAD Yang sah			
Pendapatan Retribusi	21,250,000,000	21,375,842,500	100.59
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	21,250,000,000	21,375,842,500	100.59
BELANJA			
Belanja Langsung			
Belanja Pegawai	9,217,360,000	6,916,759,500	75.04
Belanja Bahan	12,270,640,000	11,480,372,750	93.56
Belanja Administrasi Umum	17,379,000,000	13,126,275,074	75.53
Belanja Modal	4,082,500,000	3,813,816,050	93.42
Jumlah Belanja Langsung	42,949,500,000	35,337,223,374	82.28
Surplus (defisit)		(13,961,380,874)	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Pada tahun 2009 pengelola Taman Margasatwa Ragunan kembali mengalami defisit anggaran yaitu sebesar 13,961,380,874 rupiah, dimana jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2008. Kemudian untuk perhitungan Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP) tahun 2009 adalah sebagai berikut:

$$\text{REBP: } \frac{21,375,842,500}{35,337,223,374} \times 100\% = 60.49\%$$

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa REBP tahun 2009 tidak jauh berbeda dari tahun 2008, yaitu dengan rasio sebesar 60.49%, walaupun ada sedikit peningkatan namun hal tersebut masih menunjukkan bahwa kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan dalam kategori tidak efisien karena berada dalam persentase dibawah 100%, maka dapat dikatakan pada tahun 2009 kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan tidak efisien. Kemudian untuk tahun 2010 dapat dilihat dalam realisasi anggaran Taman Margasatwa Ragunan untuk tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Anggaran Taman Margasatwa Ragunan 2010

Uraian	Anggaran		Penyerapan
	Plafon Setelah	Realisasi	(%)
PENDAPATAN			
Lain-lain PAD Yang sah			
Pendapatan Retribusi	21,850,000,000	22,387,887,050	102.46
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	21,850,000,000	22,387,887,050	102.46
BELANJA			
Belanja Langsung			
Belanja Pegawai	9,443,869,000	7,136,742,025	75.57
Belanja Bahan	13,307,936,000	12,114,292,051	91.03
Belanja Administrasi Umum	19,434,195,000	13,463,975,225	69.28
Belanja Modal	4,094,000,000	3,824,524,792	93.42
Jumlah Belanja Langsung	46,280,000,000	36,539,534,093	78.95
Surplus (defisit)		(14,151,647,043)	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Pada tahun 2010 pengelola mengalami defisit anggaran sebesar 14,151,647,043 rupiah, dimana defisitnya lebih tinggi dari tahun 2008 dan juga 2009. Kemudian dalam perhitungan Rasion Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP) adalah sebagai berikut:

$$\text{REBP} = \frac{22,387,887,050}{36,539,534,043} \times 100\% = 61.27\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai REBP pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 61.27%, hal tersebut ditunjaPeng melalui pendapatan yang meningkat pada tahun tersebut, namun tetap saja persentasenya masih dibawah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan pada tahun 2010 tidak efisien.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan dibagi menjadi dua yaitu anggaran pengeluaran

subsidi dan anggaran pengeluaran non-subsidi. Anggaran subsidi adalah anggaran yang dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta karena biaya-biaya tersebut tidak mampu ditutup dari hasil pendapatan retribusi, sedangkan anggaran non-subsidi adalah biaya-biaya yang bisa ditutupi oleh hasil pendapatan retribusi. Untuk melihat apa saja yang menjadi pengeluaran subsidi dan pengeluaran non-subsidi, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.7
Anggaran Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010 (Subsidi)

No.	kode rek.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	1.08.01.013	penyediaan bahan bakar minyak	1,100,000,000	969,430,500	88.13
2	1.08.01.014	pengadaan alat tulis kantor dan benda pos	100,000,000	99,034,000	99.03
3	1.08.01.015	pengadaan barang cetakan adm kantor	50,000,000	49,292,000	98.58
4	1.08.01.017	penyediaan jasa kebersihan kantor	2,000,000,000	1,288,745,022	64.44
5	1.08.01.020	pengadaan cetakan karcis	600,000,000	512,467,600	85.41
6	1.08.01.030	iuran keanggotaan PKBSI, SEAZA, ISIS, WAZA dan majalah PKBSI	80,000,000	60,000,000	75.00
7	1.08.01.031	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,500,000,000	1,897,240,247	75.89
8	1.08.04.002	pengadaan alat-alat kebersihan	200,000,000	188,260,100	94.13
9	1.08.04.003	pengadaan makanan binatang	10,000,000,000	9,207,545,143	92.08
10	1.08.04.018	rehabilitasi kandang orang utan	830,000,000	741,440,389	89.33
11	1.08.04.019	lanjutan pembuatan kandang makaka	500,000,000	482,833,624	96.57
12	1.08.04.020	rehabilitasi kandang rusa	250,000,000	197,399,627	78.96
13	1.08.04.022	pembangunan kandang orang utan	2,500,000,000	2,323,863,370	92.95
14	1.08.07.001	Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau	4,000,000,000	2,431,034,674	60.78
		Jumlah Belanja Subsidi	24,710,000,000	20,448,586,296	82.75

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Anggaran pengeluaran yang didapat dari subsidi merupakan kegiatan-kegiatan yang menurut pengelola adalah kegiatan non-operasional dan berfokus pada *maintenance* dari Taman Margasatwa Ragunan, namun jika melihat apa saja yang menjadi anggaran pengeluaran dari subsidi ada disebutkan pengadaan alat tulis kantor dan benda pos, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik,

dimana hal tersebut adalah kebutuhan dari pihak pengelola. Dengan demikian berarti biaya-biaya yang di subsidi itu tidak hanya biaya non-operasional, tapi juga ada biaya operasional di dalamnya, berarti kebutuhan operasional belum bisa terpenuhi dari hasil pendapatan retribusi sehingga harus ditutupi oleh subsidi dari pemerintah DKI Jakarta. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi anggaran pengeluaran non-subsidi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran Pengeluaran Taman Margasatwa Ragunan Tahun 2010 (Non-Subsidi)

No.	kode rek.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	1.08.01.002	upah kerja pegawai non PNS	4,100,000,000	3,131,650,025	76.38
2	1.08.01.003	pengelolaan pusat primata Schmutzer (PPS)	700,000,000	643,000,000	91.86
3	1.08.01.004	peningkatan pelayanan pengunjung pada hari libur sabtu, minggu, nasional dan hari raya	4,200,000,000	3,296,712,500	78.49
4	1.08.01.005	pengadaan pakaian kerja pegawai	600,000,000	458,482,790	76.41
5	1.08.01.006	pengadaan obat-obatan poliklinik	100,000,000	98,011,000	98.01
6	1.08.01.007	penyediaan makanan dan minuman	150,000,000	100,000,000	66.67
7	1.08.01.008	peningkatan pengamanan TMR	110,000,000	110,000,000	100.00
8	1.08.01.009	penyediaan suku cadang kendaraan dinas dan perkakas khusus	300,000,000	298,636,105	99.55
9	1.08.01.010	penyusunan LPJ UKPD TMR	50,000,000	50,000,000	100.00
10	1.08.01.011	pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100,000,000	86,991,520	86.99
11	1.08.01.012	penyediaan ban, accu kendaraan	100,000,000	98,367,400	98.37
12	1.08.01.016	penyediaan sarana perlengkapan kantor	100,000,000	96,831,800	96.83
13	1.08.01.018	pemeliharaan alat pendingin	100,000,000	96,608,400	96.61
14	1.08.01.019	pemeliharaan komputer/hand key dan CCTV	100,000,000	96,767,000	96.77
15	1.08.01.021	pengadaan dokumen / fotocopy	100,000,000	100,000,000	100.00
16	1.08.01.022	detai desain/engineering kawasan gerbang TMR	400,000,000	376,891,160	94.22
17	1.08.01.023	kajian pembangunan penitipan kendaraan TMR	200,000,000	185,243,660	92.62
18	1.08.01.024	perlengkapan petugas loket	30,000,000	29,386,000	97.95
19	1.08.01.025	pemeliharaan komputer	100,000,000	87,308,000	87.31

		jaringan tiketing			
20	1.08.01.026	partisipasi pameran flona	150,000,000	144,713,950	96.48
21	1.08.01.027	pengadaan leaflet dan guide book	50,000,000	48,358,930	96.72
22	1.08.01.028	pengadaan kalender dinding/meja dan stiker	100,000,000	96,983,600	96.98
23	1.08.01.029	pengaturan rambu-rambu, papan nama satwa dan tumbuhan	50,000,000	48,704,000	97.41
24	1.08.01.032	audit kelistrikan	280,000,000	-	-
25	1.08.02.001	detai desain/engineering penataan kawasan TMR	750,000,000	-	-
26	1.08.03.001	lanjutan penyusunan amdal	200,000,000	-	-
27	1.08.04.004	pemeliharaan kandang-kandang binatang dilindungi	4,000,000,000	3,707,302,736	92.68
28	1.08.04.005	pelayanan krematorium	50,000,000	39,670,000	79.34
29	1.08.04.006	pengadaan obat satwa	600,000,000	472,923,160	78.82
30	1.08.04.007	tukar menukar satwa dengan LK dalam dan luar negeri	1,000,000,000	-	-
31	1.08.04.008	pelaksanaan vaksin terhadap penyakit-penyakit zoonosis	200,000,000	164,113,318	82.06
32	1.08.04.009	persiapan kelahiran satwa	100,000,000	98,953,100	98.95
33	1.08.04.010	pemeriksaan laboratorium penunjang diagnosa	50,000,000	45,000,000	90.00
34	1.08.04.011	pencegahan dini flu burung	300,000,000	271,790,492	90.60
35	1.08.04.012	pengadaan bahan laboratorium	100,000,000	98,858,000	98.86
36	1.08.04.013	general check up satwa	50,000,000	50,000,000	100.00
37	1.08.04.014	pemeliharaan alat-alat laboratorium	100,000,000	94,798,000	94.80
38	1.08.04.015	pengadaan peralatan kerja kandang	200,000,000	185,600,400	92.80
39	1.08.04.016	pengadaan peralatan kerja operasional	200,000,000	186,984,620	93.49
40	1.08.04.017	detai desain/engineering penataan children zoo TMR	300,000,000	281,856,160	93.95
41	1.08.04.021	konfrensi antar LK dan pemerhati satwa dalam dan luar negeri	100,000,000	40,320,000	40.32
42	1.08.04.023	pengadaan cold storage	600,000,000	549,738,084	91.62
43	1.08.04.024	pengadaan kendaraan roda 4 karosery khusus angkut satwa	400,000,000	390,330,000	97.58
		Jumlah Belanja Non-Subsidi	21,570,000,000	16,457,885,910	76.30

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

Jumlah belanja non-subsidi lebih kecil apabila dibandingkan dengan belanja yang dibiayai dari subsidi, padahal jumlah pendapatan yang sebesar 22 miliar rupiah sudah bisa menutupi jumlah belanja non-subsidi sebesar 16 miliar rupiah. Hal tersebut merupakan antisipasi apabila pendapatan tidak sesuai target, apabila biaya belanja non operasional lebih kecil dari pendapatan retribusi, maka selisihnya dapat dialokasikan untuk biaya-biaya yang di subsidi, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah subsidi yang diberikan kepada pengelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Selain dapat dibedakan menjadi pengeluaran subsidi dan non-subsidi, pengeluaran di Taman Margasatwa Ragunan juga dapat dibedakan berdasarkan unit kerja pengelola, seperti pengeluaran oleh sub bagian tata usaha, seksi pelayanan pengunjung, seksi kesejahteraan satwa dengan kode, dan sub kelompok jabatan fungsional. Pengeluaran oleh sub bagian tata usaha adalah pengeluaran yang paling besar, untuk tahun 2010 pengeluarannya sebesar 23,492,534,736, bahkan jumlah tersebut lebih besar dari total pendapatan yang diperoleh Taman Margasatwa Ragunan. Dengan adanya biaya yang lebih besar daripada pendapatan, dan ketidakmampuan dari hasil retribusi untuk menutupi biaya operasional menunjukkan bahwa kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan tidak efisien.

5.4 Penetapan Tarif (*pricing*)

Indikator yang terakhir dalam melihat sejauh mana tingkat efektifitas retribusi Taman Margasatwa Ragunan adalah pembahasan mengenai penetapan tarif yang menjadi dasar pengenaan retribusi. Ada beberapa hal yang dicermati terkait penetapan tarif antara lain sejauh mana tarif dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, sejauh mana tarif yang ditetapkan terhadap kualitas layanan yang diberikan, keadilan dari pengenaan tarif, dan juga kaitan antara tarif yang diberikan terhadap lingkungan.

Pengenaan tarif yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta terhadap retribusi Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan sebagai tarif yang murah, pengenaan tarif yang murah tersebut ditujukan untuk sebagai pengadaan

pelayanan oleh masyarakat, hal tersebut dinyatakan oleh salah satu Informan Dian Putra, sebagai berikut:

“...untuk retribusi yang diterapkan di TMR yaa biasa disingkat demikian, itu memang diterapkan tarif yang rendah, pemerintah DKI punya maksud tersendiri dari tarif, dimana hal itu ditujukan pada pengadaan pelayanan pada masyarakat, dan salah satunya adalah hiburan pada masyarakat dengan adanya TMR tersebut. Tarif yang diberlakukan itu bisa berapa saja, tergantung oleh pimpinan daerahnya, bisa menerapkan tarif diatas biaya ataupun tarif dibawah biaya.”(Wawancara dengan Dian Putra, 29 Mei 2011)

Penetapan tarif Taman Margasatwa Ragunan bisa dibilang sebagai tarif yang paling murah diantara kebun binatang lainnya di Indonesia, yaitu dengan tarif masuk sebesar 4000 rupiah saja pengunjung sudah dapat masuk ke dalam Taman Margasatwa Ragunan. Hal tersebut memang ditujukan untuk memberikan pelayanan dengan tarif yang murah, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta tersebut. Senada dengan hal tersebut salah satu Informan Bambang juga menjelaskan sebagai berikut:

“...tujuan kami adalah memberikan pelayanan bukan mencari untung yang sebesar-besarnya, terlebih di ragunan ini juga memiliki nilai-nilai edukasi buat anak-anak memahami binatang, dan juga hiburan untuk seluruh warga Jakarta, dengan tarif yang murah tersebut maka dapat memberikan pelayanan dan juga hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut kan menunjukkan masih pedulinya pemerintah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat bawah untuk bisa ikut menikmati hiburan di kota Jakarta.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Selanjutnya mengenai tarif murah yang diberlakukan terhadap retribusi Taman Margasatwa Ragunan juga dibahas oleh salah satu Informan Sulistami

sebagai yang merupakan pihak dari Perhimpunan Kebun Binatang se Indonesia (PKBSI), sebagai berikut:

“...tarif masuk dari taman margasatwa ragunan itu sendiri bisa dibilang tarif yang paling murah diseluruh dunia, bahkan tarifnya tidak sampai satu dollar bila dengan kurs sekarang ini, padahal ragunan itu salah satu kebun binatang yang paling besar di Indonesia dan selalu ramai didatangi oleh pengunjung, padahal kalau mas tau biaya untuk pemeliharaan kebun binatang itu tidak kecil, namun disitulah kelebihan dari pemda DKI, mereka punya keuangan yang besar, sehingga bisa memberi tarif yang murah, berbeda jika dibandingkan dengan di daerah lainnya, yang harus membiayai kebutuhan satwa dari hasil yang diperoleh dari tiket masuk, nah kalau ragunan itu banyak diberi bantuan oleh pemda, makanya mereka bisa menerapkan tarif yang murah.” (Wawancara dengan Sulistami, 21 Juni 2011)

Tarif murah yang diterapkan dalam retribusi Taman Margasatwa Ragunan memang merupakan salah satu daya tarik tersendiri, karena tidak bisa ditemukan tarif yang semurah seperti yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Padahal tidak dapat dipungkiri apabila kebutuhan akan biaya untuk pengelolaan sebuah taman satwa atau kebun binatang itu tidaklah sedikit, hal tersebut menunjukkan suatu hal yang khusus dari DKI Jakarta sehingga bisa menerapkan tarif yang murah dan memberikan subsidi terhadap pengelola Taman Margasatwa Ragunan, itu merupakan kelebihan dari DKI Jakarta yang memiliki kemampuan keuangan yang sangat besar, sehingga hasil dari retribusi bukanlah sebuah prioritas utama, hal tersebut dikatakan oleh salah satu Informan Pramudji sebagai berikut:

“...kemampuan keuangan pemda DKI itu kan besar, dari anggaran yang 30 triliun, kontribusi retribusi itu hanya 400 miliar, yang dari ragunan itu hanya 15 sampai 20 miliar, jadi kecil sekali.” (Wawancara dengan Pramudji, 29 Mei 2011)

Kemudian juga ditambahkan oleh salah satu Informan Dian Putra sebagai berikut:

“...DKI itu daerah yang anomali, sulit untuk menerapkan teori, yaa lebih dari karena kapasitas fiskal mereka sudah tinggi dan mereka membutuhkan penyediaan layanan untuk hiburan masyarakatnya, yaa salah satunya dengan memberikan tarif rendah atau bahkan menggratiskan, namun apabila menggratiskan akan banyak hal yang merugikan, maka diberikan tarif yang minimum, yaa walaupun disubsidikan jadikan apa yaa...yaa tarif itu hanya sekedar untuk membatasi penggunaan dan operasional, karena walaupun digratiskan juga tidak akan berpengaruh buat DKI.” (Wawancara dengan Dian Putra, 29 Mei 2011)

Pengenaan akan tarif yang murah memang menjadi suatu prestasi tersendiri bagi pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan layanan hiburan dengan tarif yang murah, dan hal tersebut diterima dengan senang hati oleh masyarakat, salah satunya adalah Suryati yang merupakan salah satu pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan sebagai berikut:

“...yaa sesuai, buat orang-orang seperti saya ini, dengan duit 4000 udah bisa jalan-jalan, itu udah bagus, harganya terjangkau dan murah...”
(Wawancara dengan Suryati 5 Juni 2011)

Kemudian juga ditambahkan oleh Heri yang juga menjadi salah satu pengunjung Taman Margasatwa Ragunan, sebagai berikut:

“...yang saya tau sih saya bayar tiket masuk sebesar 4ribu rupiah, ditambah 500 untuk biaya asuransi, semua orang yang sudah pernah ke Ragunan pasti juga akan paham terhadap tarifnya...yaa kalau dari harganya yang murah sih, sudah sesuai lah, namun saya heran juga yaa dari dulu tarifnya segini-gini aja ga berubah...” (Wawancara dengan Heri, 5 Juni 2011)

Tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan sudah diterima secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta, dimana pengetahuan akan tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan mudah untuk diperoleh baik dan juga tegas dijelaskan di dalam perda no.1 tahun 2006 DKI

Jakarta. Untuk tingkat keadilannya juga sudah dapat dikatakan baik karena tarifnya mampu dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas layanan hiburan dan juga pendidikan di Taman Margasatwa Ragunan.

Pengenaan tarif yang rendah memang suatu hal yang baik, namun dilain pihak ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh pengelola dengan tarif yang rendah tersebut. Kualitas yang baik juga merupakan kewajiban dari pengelola Taman Margasatwa Ragunan, walaupun dengan tarif yang murah mereka harus memberikan pelayanan yang optimal, hal ini dinyatakan oleh salah satu Informan Bona yang merupakan anggota dari Lembaga Perjuangan Hak Konsumen Indonesia sebagai berikut:

“iya selama ini kan taman margasatwa ragunan dikenal sebagai objek wisata murah meriah lah bagi anggapan kebanyakan warga, namun dengan murahnya tersebut bukan berarti pengelola lepas tanggung jawab akan kebutuhan pengunjung sebagai konsumen, dimana kualitas layanan harus terus ditingkatkan...” (Wawancara dengan Bona, 8 Juni 2011)

Kualitas memang sangat penting diberikan kepada konsumen, di Taman Margasatwa Ragunan itu sendiri walaupun dengan tarif yang murah, pengelola berusaha untuk melaksanakannya dengan baik dan sesuai standar, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu Informan Bambang sebagai berikut:

“kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengunjung yang datang ke kesini, walaupun orang bilang tarifnya murah, tapi kami tidak mau dengan alasan tarif murah tersebut lantas kami jadi memberikan pelayanan asal-asalan, kami juga punya standar minimal dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat memuaskan seluruh pengunjung yang datang, ditambah lagi kami juga selalu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, dengan pendapatan yang minimal kami akan memberikan pelayanan yang maksimal pada pengunjung.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Walaupun pengelola telah beranggapan telah memberikan pelayanan yang sesuai standar, namun masih ada beberapa kritik terhadap layanan yang diberikan oleh pihak pengelola, salah satunya diungkapkan oleh salah satu Informan Heri Sebagai berikut:

“yaa kalau dari infrastruktur sih lumayan yaa, tapi WCnya itu loh kotor dan bau, trus juga ada beberapa bagian tempat yang kotor dan sudah rusak, dari segi pelayanan yang diberikan dari pekerjanya masih bisa dibbilang kurang, mulai dari ticketing aja kita disambut dengan cemberut, trus ada juga pemandu yang kurang peduli gitu sama pengunjung...”

(Wawancara dengan Heri, 5 Juni 2011)

Dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti memang ditemukan beberapa infrastrukur yang tidak terawatt dengan baik, WC juga bisa dibbilang kurang baik dan ada bau yang tidak sedap, hal tersebut memang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, dan bisa jadi memberikan citra buruk akan kualitas layanan, berikut beberapa foto akan kondisi di Taman Margasatwa Ragunan:

Gambar 5.4

Kondisi Infrastruktur yang rusak di Taman Margasatwa Ragunan



Kualitas layanan memang berkaitan dengan tarif yang telah ditetapkan, karena dengan tarif yang rendah maka tidak bisa memberikan kualitas yang sangat

baik, dan hal itulah yang menjadi hambatan dalam memberikan kualitas layanan yang baik kepada pengunjung Taman Margasatwa Ragunan. Tapi konsumen memiliki hak untuk menerima kualitas layanan yang baik dari pemerintah, hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan salah satu Informan Bona sebagai berikut:

“...yaa pasti ada kaitannya, selama ini sih pelayanan yang diberikan oleh pengelola ragunan masih dapat dikatakan relatif kurang yaa, konsumen juga tidak bisa meminta banyak lah kepada pengelola ragunan dengan service yang memuaskan, bayangkan dengan 4 ribu saja kita tidak bisa beli mie ayam, tapi kita bisa masuk ragunan, walaupun demikian tugas dari pemerintah itu kan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, jadi seharusnya walaupun tarifnya murah, pengelola juga bisa memberi pelayanan yang baik pada konsumen, karena itu merupakan hak dari konsumen dari pelayanan yang dilakukan pemerintah.”
(Wawancara dengan Bona, 8 Juni 2011)

Kemudian penetapan tarif juga berkaitan dengan lingkungan, dimana pengelola Taman Margasatwa Ragunan bertanggung jawab dalam memelihara segala keanekaragaman di dalamnya, baik itu tumbuhan maupun satwa. Pentingnya membahas masalah lingkungan dijelaskan dan diungkapkan oleh salah satu Informan Suliswati sebagai berikut:

“dalam dunia modern sekarang ini yang sudah serba canggih, terkadang manusia itu lupa akan suatu hal yang penting, hal tersebut adalah lingkungan, baik dari hewan-hewannya, tumbuhannya, dan juga ekosistem, pembangunan terjadi semakin meningkat dan terus menggeser wilayah tumbuhan dan juga hewan-hewan liar, oleh sebab itu itu mengimbangi antara perkembangan pembangunan, juga perlu dikembangkan nilai-nilai lingkungan, salah satu solusinya yaa dengan taman margasatwa ini, kan dengan adanya taman satwa atau kebun binatang, setidaknya dapat menjadi sarana atau wadah bagi hewan dan juga tumbuhan yang dilindungi juga bahkan dikembangbiakan, walaupun dengan cara yang tidak alami, setidaknya dapat menyelamatkan mereka

dari kepunahan, kan mas sendiri juga sudah tau banyak hewan yang sudah punah, untuk itu peran dari kebun binatang itu sangatlah penting dalam mencegah keanekaragaman hayati untuk menghindari kepunahan, ragunan ini juga demikian...” (Wawancara dengan Suliswati 21 Juni 2011)

Dengan tarif yang rendah apakah cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan tersebut, walaupun demikian pemerintah selalu memberikan subsidi kepada pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan, sehingga paling tidak pengelola memperoleh suntikan dana dari pemerintah DKI Jakarta. Namun permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan juga masih dapat ditemui di lingkungan Taman Margasatwa Ragunan, salah satunya adalah seperti yang dijelaskan oleh salah satu Informan Bona sebagai berikut:

“...dua minggu yang lalu saya mendapat laporan bahwa ada satu keluarga yang hampir tertimpa pohon yang tiba-tiba saja jatuh di taman margasatwa ragunan, hal tersebut menggambarkan bahwa pengelola kurang dapat menjaga kelestarian tumbuhan yang ada disana, dan cenderung akan membahayakan para pengunjung...sekarang ragunan menggunakan jasa asuransi yaa, tapi itu bukan langkah yang preventif, seharusnya pengelola lebih bisa menjaga kelestarian pohon-pohonnya, supaya tidak tumbang dengan tiba-tiba dan mengancam pengunjung” (Wawancara dengan Bona, 8 Juni 2011)

Masalah tersebut bukanlah hal yang bisa dianggap sepele karena selain menyangkut masalah lingkungan dimana pengelola kurang bisa merawat ataupun mengawasi pohon-pohon yang berpotensi untuk tumbang, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan jiwa pengunjung. Tidak hanya terkait dengan tumbuhan, permasalahan lingkungan juga pernah dialami oleh satwa didalamnya, seperti yang dijelaskan oleh salah satu Informan Suliswati sebagai berikut:

“...pada awal tahun 2000 itu, bobot hewan yang di ragunan apabila kita bandingkan dengan yang ada di taman safari puncak itu bobotnya lebih

rendah di ragunan sebesar yaa berkisar 80% dari berat badan hewan yang ada di taman safari, tapi sekarang sudah lebih meningkatlah, itu kan menunjukkan ada peningkatan kualitas dari pengelola taman satwa ragunan, walaupun dengan tarif yang rendah, itu pun karena subsidi yang diberikan pemerintah DKI.” (Wawancara dengan Suliswati, 21 Juni 2011)

Selain itu ada juga terkait masalah sampah, dari hasil peninjauan peneliti ditemukan beberapa titik-titik di Taman Margasatwa Ragunan yang ada tumpukan sampah, hal tersebut juga termasuk dalam masalah lingkungan yang masih kurang mendapat perhatian dari pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Benturan antara tarif yang murah dengan kualitas layanan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri, lantas bagaimana tarif yang ideal sehingga bisa memenuhi keadilan bagi masyarakat namun dilain pihak juga bisa meningkatkan kualitas layanannya. Ada juga pendapat dari salah satu Informan Suryati yang beranggapan bahwa tarif yang murah lebih penting daripada kualitas layanan, sebagai berikut:

“...yang penting buat saya itu tiket masuknya murah, dan bisa buat bikin anak-anak seneng dengan harga yang murah itu.” (Wawancara dengan Suryati, 5 Juni 2011)

Namun ada juga yang beranggapan lain bahwa peningkatan kualitas layanan juga penting seperti yang disampaikan oleh salah satu Informan Heri sebagai berikut:

“murah itu bagus, tapi yaa harus diimbangi juga dengan pelayanannya, saya rasa apabila tarifnya dinaikan menurut saya tidak menjadi masalah, mungkin dikisaran 10rb seperti di ancol itu kan sudah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada disini, yang penting kan kepuasan dari pengunjungnya.” (Wawancara dengan Heri, 5 Juni 2011)

Keseimbangan antara tarif dan juga kualitas layanan adalah sebuah titik ideal dalam penetapan tarif, dimana tarif yang diterima secara luas oleh masyarakat dan juga tidak begitu membebankan, namun dapat memberikan

pelayanan yang optimal dari tarif yang diberikan tersebut, ada pendapat lain mengenai tarif yang ideal seperti yang diungkapkan salah satu Informan Bona sebagai berikut:

“saya kurang memahami betul tentang tarif yang ideal, karena saya juga tidak tahu persis berapa kebutuhan dari taman margasatwa ragunan, tapi jika bisa menerka secara kasar saja mungkin dengan tarif berkisar 10-15ribu masih dapat dikatakan terjangkau dan juga tidak terlalu murah untuk pengelolaan taman margasatwa tersebut.” (Wawancara dengan Bona, 8 Juni 2011)

Pendapat lain juga diungkapkan oleh salah satu Informan Suliswati dengan menggunakan standar minimal tarif untuk taman satwa sebagai berikut:

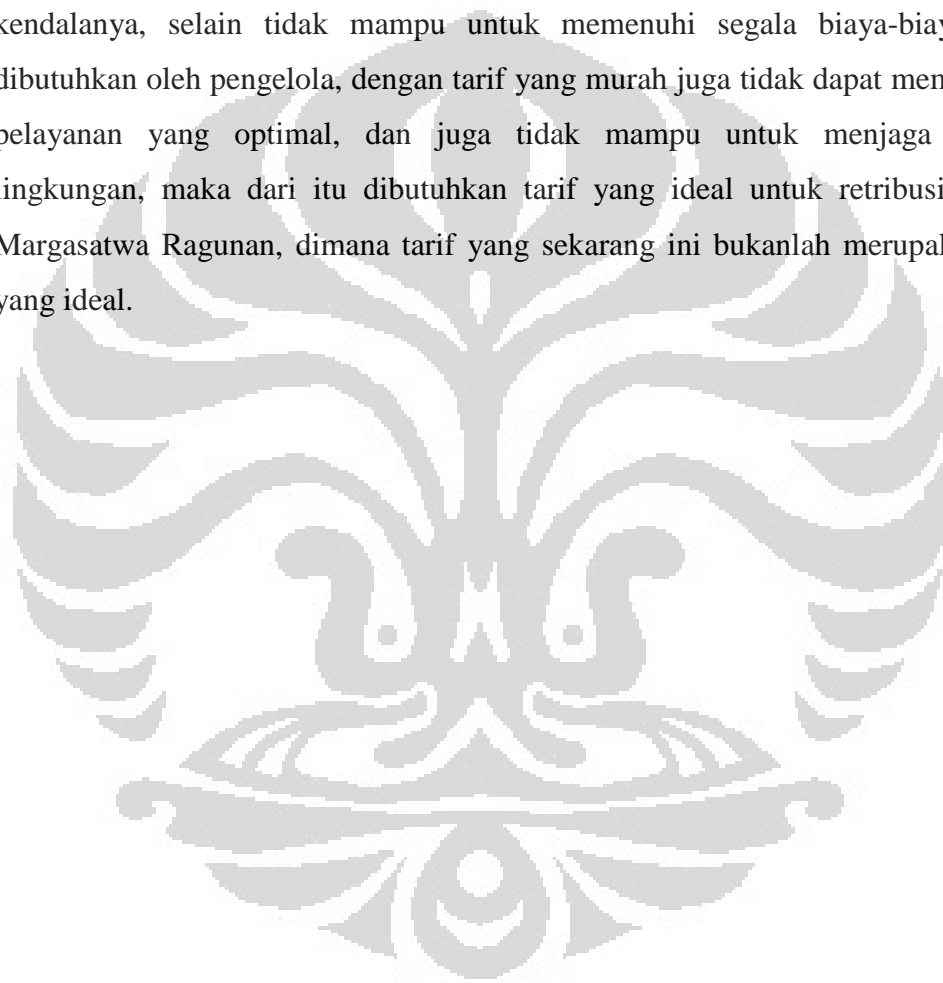
“...kita mempunyai standar minimal untuk tarif taman satwa atau kebun binatang yaitu dalam kisaran 1 dollar, atau yaa dalam rupiah 10.000 rupiah, dengan tarif sebesar tersebut diperkirakan dapat menutupi biaya makan, perawatan, dan kebutuhan lainnya dari pengelola taman satwa...” (Wawancara dengan Suliswati, 21 Juni 2011)

Ada juga pendapat lain dari pengelola Taman Margasatwa Ragunan, yaitu yang dijelaskan oleh salah satu Informan Bambang sebagai berikut:

“penerimaan yang paling besar itu kan dari tiket masuk, walaupun dengan tarif yang sangat minim, untuk tahun lalu saja kami memperoleh 14 miliar dari pembelian tiket masuk atau 2/3 dari total penerimaan keseluruhan yang sebesar 22 miliar, apabila dinaikan menjadi 2x lipat saja menjadi 8000 rupiah untuk tiket masuk, dan dengan asumsi pengunjung yang datang tetap sama, maka pengelola dapat memperoleh 28 miliar, itu belum ditambah dari hasil pendapatan pemakaian fasilitas, maka bisa melebihi dari kebutuhan pengeluaran yang besarnya 36 miliar, padahal kalau menurut saya pribadi tarif yang dinaikan jadi 2x lipat atau 8000 itu masih dapat dikatakan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, jadi menurut saya tarif tersebut adalah tarif yang tepat untuk

diterapkan di taman margasatwa ragunan ini.” (Wawancara dengan Bambang, 27 Juli 2011)

Tarif retribusi Taman Margasatwa Ragunan yang murah memiliki keunggulan dimana tarif tersebut diterima secara luas oleh masyarakat dan juga memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan, namun dilain pihak juga memiliki kendalanya, selain tidak mampu untuk memenuhi segala biaya-biaya yang dibutuhkan oleh pengelola, dengan tarif yang murah juga tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal, dan juga tidak mampu untuk menjaga kondisi lingkungan, maka dari itu dibutuhkan tarif yang ideal untuk retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana tarif yang sekarang ini bukanlah merupakan tarif yang ideal.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas Taman Margasatwa Ragunan” menghasilkan sebuah kesimpulan dari permasalahan mengenai apakah kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan berjalan efektif atau tidak, dan ternyata dari keempat sub-indikator yang ada kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan belum berjalan efektif karena tidak semua sub-indikator dapat terpenuhi, dapat dilihat dari setiap sub-indikator sebagai berikut:

- Baik undang-undang maupun peraturan daerah sudah mendukung kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, dimana dalam Undang-undang sudah menerapkan diskresi penetapan tarif dan dalam perda telah memaparkan secara jelas dan rinci akan kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan, namun masih terkendala akan tarif yang ditetapkan kerana tidak sesuai dengan prinsip penetapan tarif yang ada. Pengelolaan kegiatan retribusi juga sudah berjalan dengan baik karena sudah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- Tingkat efektifitas retribusi dalam perhitungan IKR, pengelola Taman Margasatwa Ragunan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, kecuali pada tahun 2008 dimana target penerimaan tidak dapat dicapai sepenuhnya, untuk tahun 2009 dan 2010 telah mencapai nilai positif dimana pengelola dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Menilai efektifitas juga dapat dilihat dari sistem pemungutan yang dilakukan, dimana masih ada permasalahan dalam hal pemungutan yaitu ketika hari jumlah pengunjung melonjak tajam. Dalam hal pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan baik dimana sesuai antara yang dilaporkan dan di terima di Pemprov DKI, maka dalam indikator efektifitas atau hasil guna, maka kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan dapat dikatakan telah efektif.

- Melalui perhitungan REBP ditemukan bahwa selama tiga tahun terakhir, hasilnya selalu dibawah 100% yaitu berkisar pada persentase 60% saja, hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan tidak dapat ditutupi oleh hasil dari retribusinya. Tidak terpenuhinya secara penuh biaya operasional menunjukkan bahwa pemungutan retribusi Taman Margasatwa Ragunan tidak efisien, dan juga mengalami defisit anggaran, sehingga dapat dikatakan dari segi daya guna retribusi Taman Margasatwa Ragunan tidak efektif.
- dari segi keadilan dan juga diterima secara luas akan tarif tersebut, maka tarif tersebut sangat diterima secara luas oleh masyarakat dan memenuhi prinsip keadilan karena dengan tarif yang murah, berarti pemerintah dapat memberikan pelayanan berupa hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dilain pihak dampak dari penetapan tarif yang rendah ini adalah berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan, dimana ada berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas infrastruktur maupun pelayanan yang diberikan oleh pengelola. Kemudian juga ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan yang dialami oleh pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

6.2 Saran

Secara umum kegiatan retribusi Taman Margasatwa Ragunan belum, permasalahan utama dari kegiatan retribusi tersebut adalah mengenai tarif yang terlalu rendah, sehingga pengelola tidak bisa mengembangkan kegiatan di Taman Margasatwa Ragunan dengan optimal. Dibutuhkan sebuah solusi terhadap tarif memiliki nilai yang ideal, dimana tarif tidak terlalu besar sehingga dapat membebaskan masyarakat, namun juga dengan tarif tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan Taman Margasatwa Ragunan. Selain itu peningkatan kualitas layanan juga sangat diperlukan sehingga dapat membuat pengunjung merasa nyaman di dalam lingkungan Taman Margasatwa Ragunan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Elektronik:

- Kompas.*Harga Tiket Masuk Ragunan Bakal Naik.*<http://travel.kompas.com/read/2011/01/04/12184248/Harga.Tiket.Masuk.Ragunan.Bakal.Naik> diunduh pada tanggal 24 januari 2011
- Media Online Pemprov DKI Jakarta.*Ragunan Masih Dipadati Pengunjung.*http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=42799 di unduh pada tanggal 21 januari 2011
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman MargasatwaRagunan.*<http://prov.jakarta.go.id/jakv1/item/halaman/0/0/2625/1/6/2/42/3/6/4/42/5/218/6/248/nid/2625> diunduh pada tanggal 17 januari 2011
- Taman Margasatwa Ragunan.*Mengenal Kebun Binatang Ragunan.*<http://www.jakartazoo.org/?show=profile> di unduh pada tanggal 13 januari 2011
- Vivanews.*Harga Tiket Kebun Binatang Ragunan Akan Naik.*http://metro.vivanews.com/news/read/47522-harga_tiket_kebon_binatang_ragunan_akan_naik diunduh pada tanggal 27 januari 2011

Skripsi dan Tesis:

- Dedyanto.2003. *Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir Propinsi DKI Jakarta.* Depok: Fisip UI
- Marlina, Lenny. 2003. *Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta.*Depok: Fisip UI

- Silalahi, Levi Amos hasudungan. 2008. *Retribusi Terminal baranangsiang Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*, Depok: Fisip UI
- Wibawati, Dini. 2005. *“Analisis Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung”*, Bandung: Fisip UNPAD
- Yudha, Agus Dwi. 2008. *Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*. Depok: Fisip UI

Buku:

- Abdullah, “Pajak dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, Jakarta : Gramedia, 1984.
- Arifin, Bustanul dan Rachbini, Didiék J, 2001, *Ekonomi Politik dan kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Creswell, John W, “*Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*”, Thousand Oaks, California. USA : Sage Publication, 1994.
- Davey, K.J, “Pembiayaan Pemerintah Daerah”, Jakarta : UI Press, 1998.
- Fischer, Ronald C., “State and Local Public Finance”, USA : Times Mirror Higher Education Group, 1996.
- Kasim, Azhar. 1993. *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Depok: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *sinergi pusat dan daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal (pelengkap buku pegangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah)*, (Jakarta: DJPK), 2009
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mamesah DJ, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Penerbit. Jakarta : PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2002.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, “Panduan Pengawasan Keuangan Daerah : Wawasandan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah, Adib Achmadi (ed.), Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005.

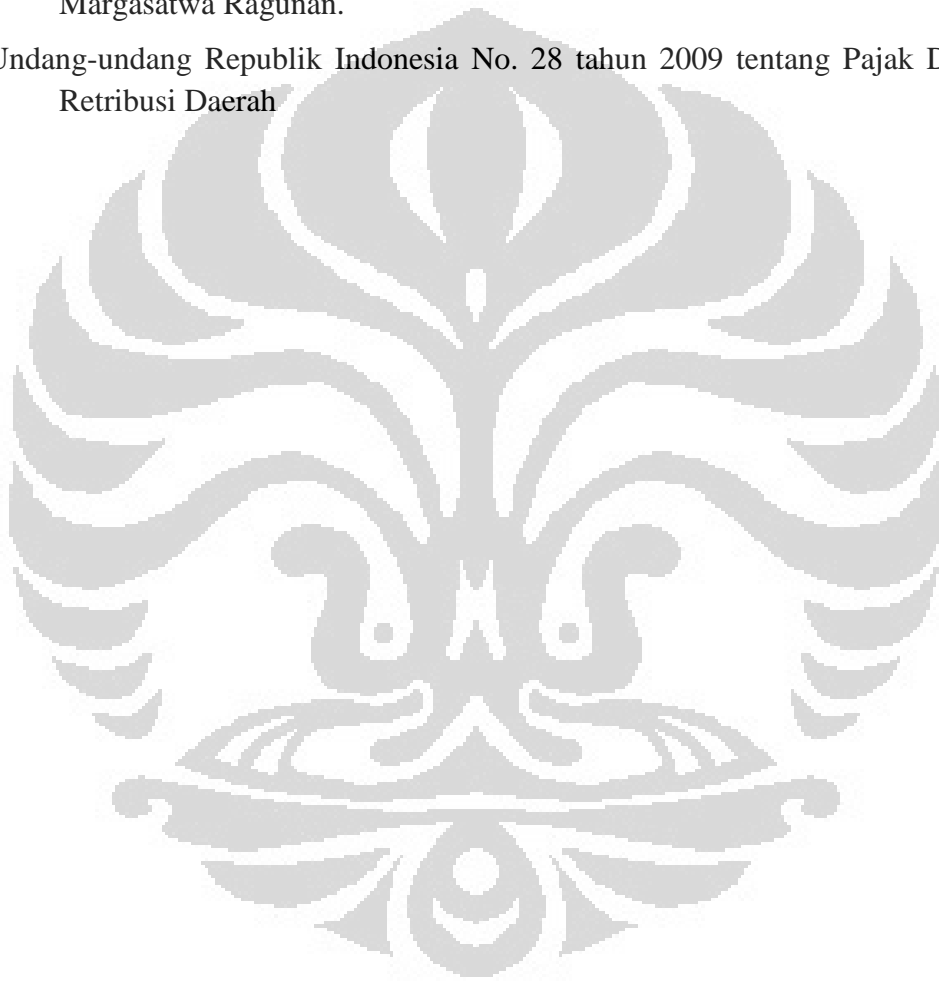
- McMaster, James, “Urban Financial Management *A Training Manual*”, The International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A, 1991.
- M.Bird, Richard, *Intergovernmental Relations, Local Application*, Georgia : Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, USA, 2000.
- Musgrave Richard A and Peggy B, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek – Terjemahan Drs. Alfonsus Sirait, Ak., dkk*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan IV Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nick Devas, et. al., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1989.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, fourth edition, USA: Allyn & Bacon, 2000.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosen, Harvey S, 1995, *Public Finance*, Richard D Irwin, Inc.
- Salomo, Roy V dan M. Ikhsan, “Keuangan Daerah di Indonesia”, Jakarta : STIA-Lan Press, 2002.
- Samudra, Azhari A. “Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi”, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Soelarno Slamet, 2000, *Administrasi Pendapatan Daerah*, Jakarta : STIA LAN Press.
- Soedargo, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: Ersco.
- TIM PDRD Depkeu, *Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : Depkeu), 2007
- Zorn, C. Kurt, “*User Charges and Fees*”. Dalam John F. Patersen dan Dennis F Strachoto (Eds.). *Local Government Finance : Concepts and Practices*. Chicago, Illinois, USA; Government Finance Officers Association, 1991.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 135 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Kurniawan Pujianto
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Juni 1989
Alamat : Jl. Cerucuk no. 24 rt 04/02 kel. Bukit Duri
Kec Tebet, Jakarta Selatan 12840
Nomor telepon, email : (021) 8309161, 085697307157
trikurniawan13@gmail.com
Nama Orang tua: Ayah : Saimin Indrianto
Ibu : Pujowati
Riwayat Pendidikan Formal :
SD : SDN Bukit Duri 03 pagi (1995-2001)
SMP : SMPN 115 Jakarta (2001-2004)
SMA : SMAN 68 Jakarta (2004-2007)
S1 : Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara (2007-2011)